

ORASI ILMIAH

**Disampaikan Pada Dies Natalis Universitas Riau ke 48
30 Oktober 2010**

**PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DALAM
PERSPEKTIF
PEREKONOMIAN PROPINSI RIAU
(Studi Industri Kecil Makanan di Propinsi Riau)**

**O
L
E
H**

**Prof. Dr. H. Zulkarnain, SE.,MM
Guru Besar Fakultas Ekonomi UR**

PEKANBARU

2010

ORASI ILMIAH

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PEREKONOMIAN PROPINSI RIAU

**Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Yth. Bapak Gubernur Riau

Yth. Bapak Ketua DPRD Propinsi Riau

Yth. Bapak Walikota Pekanbaru

**Yth. Bapak Rektor Universitas Riau selaku Ketua Senat
Universitas Riau**

**Yth. Bapak Sekretaris Senat, Para Guru Besar dan
Anggota Senat Universitas Riau**

Yth. Para Pejabat Sipil, TNI dan Polri

**Yth. Para Pembantu Rektor, Para Dekan, Ketua Lembaga
dan seluruh Civitas Akademika Universitas Riau.**

Yth. Para Undangan dan hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan ridho-Nya kita dapat hadir pada acara Dies Natalis Universitas Riau ke 48 dan Wisuda Pasca Sarjana ke 23, Profesi ke 17, Sarjana ke 86 dan Program DIII ke 27, semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam lindungan-Nya, Amin Yarabbal 'Alamin.

Selanjutnya perkenankanlah dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan Universitas Riau, Para Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas ke 48 tahun 2010.

Dalam Orasi Ilmiah ini, saya mencoba mengemukakan beberapa pokok pikiran yang dilandasi oleh kajian teoritik dan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Perspektif Perekonomian Riau. Semoga pemikiran yang sederhana ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berarti bagi perekonomian Riau ke depan.

A. PENDAHULUAN

Hadirin dan Undangan yang Saya hormati,

Krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang lalu masih menyisakan berbagai persoalan ekonomi nasional yang sangat mengganggu stabilitas ekonomi, ditandai dengan runtuhnya usaha bisnis berskala besar. Sampai saat ini upaya perbaikan ekonomi nasional terus dilakukan walaupun tumbuh lamban jika dibandingkan dengan upaya negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Fundamental ekonomi nasional yang sangat rapuh dan rentan saat itu terhadap gejolak ekonomi dunia maupun kawasan regional, membuat ekonomi Indonesia sulit bangkit dalam waktu dekat sehingga memerlukan berbagai kebijakan dan skenario ekonomi yang handal agar terlepas dari lingkaran krisis tersebut.

Ironisnya, sebelum terjadinya krisis ekonomi 78 persen aset dikuasai oleh 25 konglomerat yang diganjal dengan utang luar negeri, yang sangat rawan dan rentan pula terhadap gejolak ekonomi. Krisis tersebut membawa dampak yang begitu besar terhadap perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kita dapat merasakan usaha skala besar porak poranda dan sebagian ada yang henggang ke luar negeri, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana. Belajar dari kondisi tersebut Indonesia mulai bangkit dengan kekuatan ekonomi akar rumput, sektor riil yang bertumpu kepada kekuatan sumber daya lokal dan pada saat itulah UMKM muncul sebagai penyelamat dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Berbagai kebijakan bidang moneter dan fiskal dalam bentuk paket-paket kebijakan secara perlahan memperlihatkan adanya kemajuan, walaupun turbulensi krisis masih tetap membayangi kondisi perekonomian nasional. Pencapaian program ekonomi makro Indonesia terus membaik pasca turbulensi krisis ekonomi dunia 2008-2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai kuartal II sudah mencapai angka 5 persen. Bahkan Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi

Indonesia akan tumbuh kisaran 6,2 persen. Perbaikan kinerja ekonomi makro Indonesia diharapkan melahirkan keseimbangan antara kekuatan pelaku ekonomi skala besar, menengah dan kecil.

Prediksi membaiknya perekonomian nasional pada tahun 2010 diharapkan akan berpengaruh positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi daerah termasuk Propinsi Riau. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Riau akan menembus angka 8 persen. Hal ini tentunya sangat beralasan sebagai daerah penghasil minyak dan perkebunan kelapa sawit yang terluas saat ini. Hal ini akan mengulangi prestasi pencapaian yang pernah diraih pada tahun 2006-2007 yang lalu. Pertumbuhan ekonomi dengan migas berada di kisaran 4,2 - 4,9 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas justru tumbuh jauh lebih besar di kisaran 7,8 - 8,5 persen, sedangkan angka tekanan inflasi berada di angka 4,5 persen. Prediksi perekonomian Riau yang diperkirakan membaik ini seharusnya berdampak positif pula terhadap program ekonomi rakyat yang bergerak pada berbagai sektor pertanian pada umumnya, perindustrian dan perdagangan serta jasa lainnya

Keberpihakan pemerintah pusat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kurun lima tahun terakhir ini dinilai positif dan merupakan apresiasi yang tinggi terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat itu sendiri. Hal ini ditandai dengan terbitnya UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat melindungi pelaku usaha ekonomi rakyat dan mampu bersaing di kancah ekonomi regional dan global. Lebih dari 20 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dikucurkan ke berbagai sektor perekonomian rakyat. Komitmen pemerintah pusat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya tidak sesaat, tetapi lebih dari itu berkelanjutan sehingga pelaku ekonomi UMKM benar-benar merupakan kekuatan ekonomi nasional yang dapat diandalkan. Pemberdayaan ekonomi rakyat pada hakekatnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah, pembukaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, peningkatan penggunaan sumber daya lokal dan

menggerakkan sektor ekonomi lainnya secara keseluruhan. Perhatian dan keberpihakan pemerintah ini memiliki arti strategis karena menyangkut nasib masyarakat luas dalam berbagai sektor perekonomian. Sungguhpun demikian kita tidak dapat mengabaikan konsep pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan pembangunan sebagai pilar pembangunan ekonomi bangsa.

Propinsi Riau sebagai daerah penghasil minyak dan gas juga sebagai daerah penghasil dan pengekspor CPO dan karet yang besar. Hal ini didukung oleh luasnya areal perkebunan yang dimiliki. Demikian pula dengan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti; tanaman pangan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi propinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, walaupun ada kecenderungan mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Riau Tanpa Migas Menurut Sektor

N o.	Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	6,77	5,97	4,84	4,79	6,07
2.	Pertambangan dan Penggalian	27,24	28,61	24,57	18,13	9,82
3.	Industri Pengolahan	9,08	8,62	11,41	8,96	4,79
4.	Listrik dan Air Bersih	9,20	5,86	11,41	6,86	2,80
5.	Bangunan	7,15	8,37	11,65	11,14	8,73
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	10,15	11,66	8,94	9,72	9,50
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	10,29	8,73	7,38	10,45	6,69
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	18,18	15,67	13,33	13,65	8,23
9.	Jasa-jasa	7,89	10,03	9,71	9,25	8,11
	Propinsi Riau	8,53	8,59	8,25	8,06	7,20

						*)
--	--	--	--	--	--	----

Sumber : BPS Propinsi Riau, *) KBI diolah, angka sementara

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yakni rata-rata 44,78 persen, sektor industri pengolahan yakni rata-rata 29,29 % dan diikuti sektor pertanian yakni rata-rata 19,25 persen. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih dan pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi terkecil yakni rata-rata 0,31 dan 0,33 persen. Dengan kata lain perekonomian propinsi Riau digerakkan oleh tiga sektor terbesar yakni pertambangan dan penggalian, pertanian dan industri pengolahan. Sedangkan sektor-sektor lainnya walaupun memberikan kontribusi sedang dan kecil tetap memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian Riau ke depan.

Tolok ukur peranan sektor industri dalam perkembangan struktur perekonomian yang terpenting ialah : (a) besarnya sumbangan sektor industri (*manufactring*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor industri, (c) besarnya sumbangan produk sektor industri terhadap ekspor barang dan jasa. Berdasarkan standar perkembangan industri relatif yang disusun oleh badan PBB untuk pembangunan industri (UNIDO), peranan sektor industri dalam perkembangan struktur ekonomi negara-negara dapat digolongkan menjadi empat tahap, yaitu : (1) pertanian/non-industri (*agriculture*), (2) menuju proses industrialisasi (*industrializing*), (3) semi-industri (*semi-industrialized*), dan (4) industri penuh (*industrialized*) (Isyandi, 1996).

Pengalaman ekonomi di negara-negara maju mengungkapkan karakteristik tingkat perubahan struktural melekat pada proses pertumbuhan. Perubahan struktural tersebut merupakan pergeseran yang bergerak sedikit demi sedikit dari aktivitas pertanian ke industri dan kemudian ke sektor jasa. Dalam hal ini proses perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan dalam kontribusi sektoral terhadap

keluaran nasional sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian sektor jasa.

Pelaksanaan otonomi daerah pada awal era reformasi dan globalisasi yang ditandai adanya kesepakatan perjanjian (AFTA, APEC dan WTO) membawa perubahan terhadap struktur dan pertumbuhan sektoral perekonomian. Pergeseran antar sektor ekonomi yang terjadi sejalan dengan pemikiran-pemikiran pada ahli. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian propinsi Riau pada hakekatnya juga mengalami beberapa pergeseran dan dominasi sektor tertentu, namun lebih jauh perlu pengkajian yang lebih mendalam menyikapi perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun global. Ketergantungan sektor ekonomi terhadap perekonomian global harus disikapi untuk menghindari terjadinya stagnan yang berpengaruh terhadap eksistensi sektor ekonomi itu sendiri.

Salah satu peran penting dalam mengembangkan ekonomi rakyat adalah adanya peran kewirausahaan dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran wirausaha menjadi sangat penting dan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimainkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menyelamatkan perekonomian nasional dari kehancuran. Sebagai katup penyelamat perekonomian nasional UMKM dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan peluang usaha baru sejalan dengan pesatnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, gerakan memasyarakatkan kewirausahaan memiliki arti yang sangat strategis dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi rakyat yang menjadi komitmen mengangkat kegiatan ekonomi akar rumput agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Sebagaimana negara-negara lainnya, seyogyanya pengembangan program kewirausahaan dapat dijadikan momentum awal untuk memacu laju pertumbuhan UMKM yang tangguh dan mandiri.

Morrison (2000) mengemukakan bahwa proses menjadi wirausahawan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor manusia dan intuisinya, masyarakat, dan budaya dimana wirausahawan tersebut berasal. Kirzner (dalam, Morrison 2000) meyakini bahwa sumber wirausaha berasal dari semangat individu itu sendiri yang tercermin dengan jelas dalam menghadapi ketidakpastian dan persaingan.

Schumpeter, Kirzner dan Knight dalam Carree dan Thurik (2002) mengemukakan bahwa ada tiga peranan yang menonjol dari seorang wirausahawan, yakni; *pertama*, wirausahawan sebagai *innovator*, dimana seorang wirausahawan selalu mencari kombinasi sumberdaya dalam menjalankan usahanya; *kedua*, wirausahawan sebagai individu yang mencari peluang yang menguntungkan; *ketiga*, wirausahawan menyukai resiko. Dalam hal ini, jika seorang memulai usaha baru dengan produk baru, maka ia dapat dikatakan seharusnya memiliki ketiga peran tersebut, yaitu peran sebagai *innovator*, sebagai pencari peluang, dan suka akan resiko yang dipertimbangkan.

Kenyataannya usaha skala kecil justru dapat bertahan di era krisis tersebut dan dijadikan tulang punggung ekonomi nasional untuk menyelamatkan nasib bangsa ini dari keterpurukan. Oleh karena itu pemerintah bertekad untuk membangun sistem ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan (ADB, 2002). Kondisi tersebut mengilhami lahirnya Sistem Ekonomi Kerakyatan yang sebelumnya dikenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Sungguhpun sistem ini belum memiliki fundamental sistem yang diakui dan teruji didalam pelaksanaannya sebagaimana sistem ekonomi yang sudah kita kenal seperti sistem ekonomi kapitalis (liberal), sosialis, komunis maupun sistem ekonomi pasar di era globalisasi saat ini, namun tetap dijadikan acuan untuk mengembangkan sistem ekonomi nasional termasuk diaplikasikan dalam program pembangunan daerah, sebagaimana dimatkan dalam TAP MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Demokrasi Ekonomi.

Dalam prakteknya usaha kecil banyak mengalami berbagai kendala diantaranya kurangnya kemampuan dalam permodalan termasuk akses terhadap sumber permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, terbatasnya akses dan informasi pasar, kurangnya kemampuan dalam manajemen usaha dan aspek manajerial termasuk rendahnya keberpihakan pemerintah dalam aspek yuridis formal dalam bentuk perlindungan usaha, terbatasnya kemampuan dalam aspek produksi dan kualitas yang dihasilkan. Keterbatasan ini menyebabkan sulitnya posisi usaha kecil menjadi usaha kecil yang sehat. Secara kuantitas jumlah usaha kecil terus bertambah, namun secara kualitas masih memerlukan berbagai kebijakan dan langkah strategis menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.

Serangkaian kebijakan dan program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat sedikit

banyaknya membawa pengaruh untuk merubah tatanan ekonomi dalam berbagai aspek, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi baik di pedesaan maupun perkotaan. Proses pembelajaran tentang aplikasi sistim ekonomi kerakyatan telah dijalankan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, namun ada yang mampu bertahan dan berkembang dengan baik dan disisi lain banyak juga yang tak mampu bertahan dan berlangsung dalam proses yang alamiah. Oleh karena itu pengembangan program ekonomi kerakyatan baik secara nasional maupun lokal perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagai suatu program yang dapat menumbuhkembangkan usaha kecil sebagai suatu kekuatan ekonomi yang dapat menopang kekuatan ekonomi nasional.

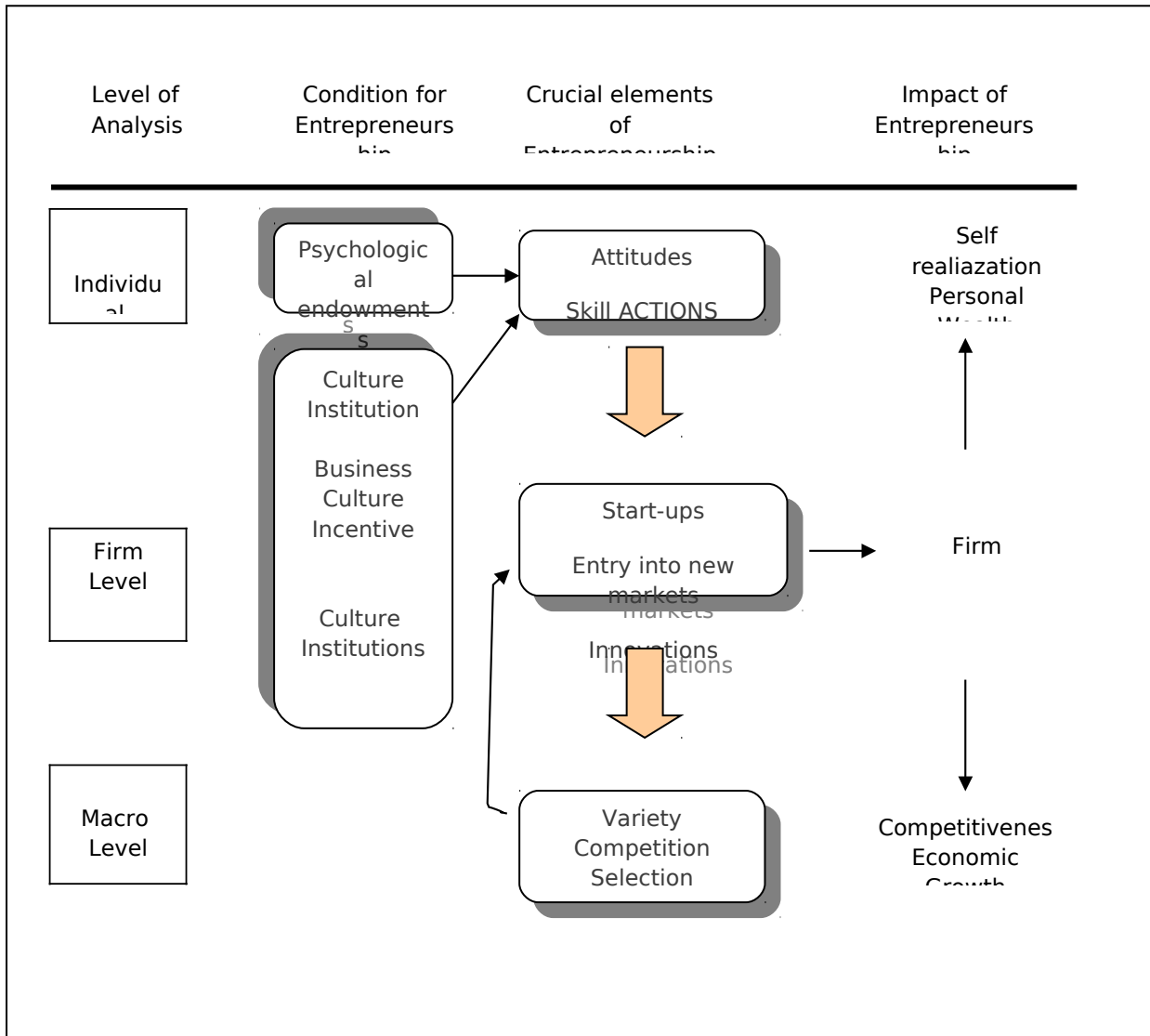
Potret Usaha Kecil dapat dipandang dari keberhasilan pembinaan dan kinerja yang didapat berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Kedua aspek ini dapat dijadikan langkah awal untuk merumuskan kompetensi wirausaha yang dibutuhkan dan dikaitkan dengan program pengembangan ekonomi rakyat dan pertumbuhan usaha kecil dalam upaya menciptakan suatu model kelembagaan yang dapat mendukung usaha kecil yang tangguh dan mandiri.

Porter dalam Carree dan Thurik (2002), menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan jantung dari keunggulan nasional. Peran kewirausahaan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, banyak dibahas dan dikaitkan dengan faktor lain, dimana peran usaha kecil dalam dunia ekonomi tidak diragukan lagi. Di Negara berkembang termasuk Indonesia peran usaha kecil begitu menonjol, terutama ketika Negara mengalami krisis ekonomi maka peran usaha kecil dijadikan andalan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Storey dalam Hill dan Mc Gowan (1999) mengemukakan bahwa usaha kecil merupakan faktor penentu dari sebagian besar ekonomi di dunia. Di Negara maju pun peran usaha kecil mendominasi unit usaha yang ada, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan unit usaha skala menengah dan besar. Meredith *et.al* (1995) kewirausahaan mengandung unsur kepercayaan diri, orientasi, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, originalitas atau kreatifitas dan orientasi kemasa depan.

Selanjutnya Carree dan Thurik (2002) mengemukakan suatu model peran kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam tingkat individu, dalam skala mikro maupun makro meliputi *self-employed entrepreneurship*,

managed business owners, dan intrapreneur, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Model Peran Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Carre dan Thurik (2002)

Dari gambar tersebut diatas tingkat analisis dapat dilihat dari individual, perusahaan maupun secara makro ekonomi. Di tingkat individual ada dorongan secara psikologis untuk membentuk sikap yang mengarah kepada keahlian bertindak untuk menciptakan inovasi dan pasar baru dalam mencapai kinerja usaha. Hal ini diharapkan akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi secara kompetitif dan merealisasikan kesejahteraan individu. Namun didalam praktek

usaha kecil peran kewirausahaan lebih menonjol karena dikendalikan sendiri oleh pemiliknya dalam berbagai fungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pandangan ahli kewirausahaan tentang keberhasilan suatu usaha memiliki perspektif yang berbeda. Osbonre (1993) dalam suatu studi tentang keberhasilan kewirausahaan, menolak ide keberhasilan dipersamakan dengan kompetensi wirausaha. Selanjutnya Osborne merekomendasikan suatu pergeseran dari fokus personalitas atau karakteristik pendiri usaha kepada karakteristik perusahaan yang mendasari konsep usaha dan kapasitas mengakumulasi modal. Dalam memulai usaha, ia menyarankan wirausahawan, memulai (membangun) suatu badan usaha yang telah memiliki dukungan lingkungan, memahami bagaimana pelanggan menilai manfaat produk/jasa, dan sebaliknya jangan memulai usaha dimana sudah terdapat satu atau beberapa perusahaan yang telah mendominasi pasar melalui produk yang sama dan memimpin harga. Selain itu seorang wirausahawan harus memahami masalah-masalah ekonomi yang mendasari usahanya, serta harus berhati-hati pada saat akan memulai suatu usaha, karena untuk memulai suatu usaha dibutuhkan modal yang cukup banyak sehingga menyedot arus kas perusahaan.

Di banyak negara peran sektor swasta banyak didominasi UMKM, di negara industri maju sekalipun membutuhkan UMKM sebagai sumber inovasi, dinamisme dan penciptaan lapangan kerja. Namun penting untuk disadari bahwa tidak ada hal yang unik atau ajaib mengenai UMKM. Usaha yang lebih besar, termasuk perusahaan asing, memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan mereka berperan melebihi UMKM diberbagai sektor. Jadi bukan berarti *"besar itu jelek, kecil itu bagus"*. (ADB SME Development, 2002)

Banyak pendekatan upaya pengembangan UMKM, sehingga memandang posisi UMKM secara terlepas dari lingkungan lebih luas dimana ia beroperasi, sehingga UMKM semakin terisolasi dari arus utama perekonomian. Pendekatan seperti didasarkan pada pandangan bahwa usaha kecil (tidak seperti usaha besar) memang dasarnya lemah dan memerlukan dukungan serta perlindungan khusus. Terlebih lagi memfokuskan program pengembangan UMKM pada hal praktis dalam bentuk bantuan usaha langsung tampaknya lebih mudah dan bebas resiko, dibandingkan tantangan dan rintangan politis kalau program ini mencakup lingkungan lebih luas (ADB SME Development, 2002)

Kebijakan industri nasional mendorong terbangunnya; 1) industri berbasis agro, 2) penguatan dan pengembangan industri kecil dan menengah, 3) peningkatan industri kecil menengah tertentu, 4) kerjasama yang saling menguntungkan antar industri besar, menengah dan kecil, 5) industri yang mempunyai daya serap tenaga kerja yang signifikan, berbasis sumber daya alam lokal terutama pertanian dan perikanan, mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri namun juga memiliki potensi ekspor, 6) industri dapat bersifat pada sumber daya alam, padat tenaga kerja, padat modal ataupun padat teknologi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang tertuang dalam PP No. 7/2005 fokus jangka menengah (2004-2009) adalah penguatan dan penumbuhan 10 klaster industri, dimana 6 dari klaster tersebut telah tumbuh dan berpotensi dikembangkan di Provinsi Riau, yaitu industri kecil makanan dan minuman, industri pengolahan hasil laut, industri kelapa sawit, industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu), industri karet dan barang karet serta industri pulp dan kertas. (Disperindag Provinsi Riau, 2006)

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, perkembangan Usaha Kecil tahun 2009 tercatat 4.594 unit usaha yang terdiri dari industri pangan 3.252 unit, industri kerajinan 527 unit dan industri sandang 819 unit. Kontribusi industri pangan sebesar 70,79 persen, industri kerajinan sebesar 11,47 persen dan industri sandang sebesar 17,74 persen. Data ini memberikan informasi bahwa pertumbuhan industri pangan begitu besar dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Pertumbuhan industri kecil pengolahan makanan yang berkembang begitu pesat semenjak terjadinya gejolak ekonomi dan pertumbuhan pasar pada akhir-akhir ini.

Pertumbuhan industri kecil pengolahan makanan dan minuman mendorong tumbuhnya nilai investasi, hasil produksi, jumlah tenaga kerja, dan produktivitas usaha. Disisi lain melahirkan produk unggulan daerah yang dapat memasuki pasar lokal, nasional maupun sebagai produk yang memiliki peluang ekspor, seperti; lempuk durian, dodol nangka dan kedondong, keripik nenas, keripik pisang, kerupuk amplang, lanting, gula merah, *virgin coconut oil*, sagu lemak, bolu kemojo, dan berbagai jenis makanan lainnya yang cukup populer di kalangan masyarakat termasuk dijadikan oleh-oleh bagi para pendatang.

Disisi lain penguatan industri kecil dan menengah dilakukan melalui 1) pengembangan industri berbasis agro dengan bahan baku komoditas potensial (dominan, unggulan dan atau unik) yang bersifat dapat diperbarui (*renewable*), dapat ditumbuhkembangkan (ekstensifikasi), mampu dibudidayakan oleh masyarakat lokal (*feasible dan familiar*), serta berpotensi untuk diversifikasi, 2) penggunaan teknologi tepat guna yang memenuhi standar-standar kualitas produk yang sesuai dengan tuntutan pasar dan bernilai ekonomi tinggi, 3) peningkatan kapasitas dan kapabilitas perilaku industri kecil dan menengah melalui kegiatan dan cara-cara inovatif, efektif dan efisien serta berorientasi pada penumbuhan motivasi, peningkatan etos kerja dan kemampuan manajerial, 4) peningkatan kualitas produk, membangun kemampuan untuk memenuhi kuantitas dan kontinuitas permintaan pasar serta meningkatkan teknik pengemasan, dan 5) membangun dan mengembangkan jaringan pemasaran melalui kemitraan dengan lembaga atau asosiasi pemasaran baik yang bersifat langsung (*direct selling*) maupun tidak langsung serta mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran (*internet marketing*).

Industri kecil makanan dan minuman yang termasuk salah satu industri unggulan di Provinsi Riau pada hakekatnya tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya; Kota Pekanbaru yang memiliki produk unggulan seperti bolu kemojo, lempuk/dodol durian, kue bangkit dan kerupuk amplang. Kabupaten Kampar memiliki produk unggulan seperti keripik nenas dan dodol nangka. Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya; keripik pisang, gula merah dan *virgin coconut oil* sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya; dodol kedondong, lanting dan kue bawang. Beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau pada hakekatnya juga memiliki produk unggulan, namun tidak representatif dan jumlahnya relatif terbatas.

Program pengembangan industri dan perdagangan Provinsi Riau meliputi program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi, program pembinaan usaha kecil, program kerjasama antara usaha ekonomi kuat dengan usaha ekonomi lemah, program pengembangan kawasan industri, program alih teknologi, program pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok strategis dan penting lainnya, program bimbingan, penyuluhan, pengawasan industri dan perdagangan. Untuk industri unggulan di Provinsi Riau dinilai dari 1) besaran daya serap tenaga kerja, 2) besaran nilai produksi, 3) tingkat kontribusi sektor induk terhadap ekonomi regional (PDRB), 4) dominasi industri pada tatanan

regional, 5) nilai produksi dan ekspor, 6) berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan 7) industri yang menggunakan bahan baku yang dapat diolah dengan teknologi tepat guna (sederhana).

Secara umum kendala yang dihadapi oleh industri kecil makanan dan minuman pada umumnya adalah masalah permodalan, pemasaran dan kualitas produksi yang dihasilkan. Namun demikian secara kuantitas industri kecil maupun *home industry* tersebut tetap tumbuh dan berkembang sejalan dengan semakin terbukanya jumlah permintaan dan sekaligus dapat dijadikan ciri khas daerah yang menonjol.

Secara ekonomis Industri Kecil Pengolahan Makanan mampu tumbuh dan bersaing dalam tatanan perekonomian walaupun dalam skala usaha yang relatif terbatas. Oleh karena itu jenis usaha ini terus tumbuh dan berkembang walaupun masih dalam artian kuantitas dan belum secara menyeluruh menjadi usaha kecil yang berkualitas, walaupun disadari bahwa menjalankan usaha kecil banyak memiliki tantangan dan kendala didalam prakteknya. Oleh karena itu sentuhan pembinaan dan pengembangannya dari pihak-pihak yang terkait memiliki arti strategis agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Perhatian khusus yang dimaksud dapat dilakukan pemerintah, dunia usaha dan lembaga pembinaan dan swadaya masyarakat yang mulai muncul sebagai tanggung jawab sosial.

Program Ekonomi Kerakyatan pada hakekatnya mulai populer semenjak krisis ekonomi yang melanda tanah air sejak 1997 yang lalu. Program ini dirancang untuk mengangkat dan menyelamatkan usaha kecil dan menengah sebagai akibat terpuruknya kondisi ekonomi nasional pada saat itu. Oleh karena itu, secara nasional juga dibuat program pemberdayaan UMKM terutama diarahkan kepada upaya pembiayaan melalui kredit program yang disalurkan melalui perbankan. Di Provinsi Riau, dalam tiga tahun anggaran juga telah dialokasikan kurang lebih Rp. 155.742.875.500, yang dialokasikan bagi 7 Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2001-2003. Kredit yang disalurkan kepada usaha kecil dalam berbagai sektor pembangunan diantaranya pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, industri dan perdagangan, koperasi dan lembaga keuangan mikro. Sektor-sektor ini pada umumnya berbeda atau ada kesamaan untuk setiap daerah kabupaten/kota dalam wilayah Riau sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Konsepsi ini pada dasarnya untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada UMKM untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam berbagai sektor pasca krisis ekonomi yang terjadi. Operasionalnya diimplementasikan dengan membentuk PT. PER (Permodalan Ekonomi Rakyat) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau. Perusahaan ini memberikan pembiayaan usaha kepada UMKM dalam berbagai sektor terkait yang sekaligus bertindak sebagai pengawas sekaligus pembinaan terhadap usaha yang telah dikembangkan oleh UMKM. Sampai saat ini PT. PER masih tetap beroperasi dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan.

Untuk meraih keberhasilan dalam usaha, memang memerlukan kompetensi yang harus dimiliki setiap wirausahawan. Keberhasilan usaha dan kompetensi wirausaha memerlukan kajian yang lebih mendalam, apakah benar antara keberhasilan, kompetensi, pertumbuhan dan pengembangan ekonomi rakyat dalam suatu daerah memiliki korelasi yang signifikan atau sebaliknya.

B. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PROPINSI RIAU

Mencermati laju pertumbuhan ekonomi propinsi Riau yang telah disajikan pada tabel 1 di atas memberikan gambaran penting yang seharusnya untuk menentukan langkah dan kebijakan dalam program pembangunan propinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi propinsi Riau tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya seperti; sumber daya alam, penduduk, modal dan lain sebagainya. Adanya dana stimulus baik pemerintah pusat maupun daerah untuk pembangunan ekonomi juga membawa dampak dan pengaruh terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Program-program pemerintah pusat seringkali tidak sejalan dengan program-program yang dilaksanakan di daerah yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi, kurangnya koordinasi dan keterkaitan program menyebabkan banyak program-program yang berjalan tanpa didukung oleh daerah sehingga tingkat keberhasilannya juga relatif kecil. Demikian pula dengan program-program di daerah sering terkendala oleh perencanaan yang tidak matang, lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap program dapat menjadi pemicu gagalnya pelaksanaan program. Sinergisme antar program sering diwujudkan dalam bentuk *Budget*

Sharing agar pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan suatu sektor ekonomi yang didorong ke arah yang lebih baik.

Sebagai daerah yang digolongkan sebagai daerah agraris, sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang menggerakkan perekonomian di provinsi Riau memiliki dominasi yang cukup signifikan untuk diperhatikan dan dikembangkan. Sektor pertanian masih didominasi oleh sektor perkerkebunan Sektor perkebunan merupakan salah satu sub-sektor yang berkembang dengan pesat terutama sekali perkebunan kelapa sawit, kelapa dan karet. Perkebunan kelapa sawit yang pada tahun 2008 tercatat kurang lebih 1,7 juta hektar dan pada tahun 2010 diperkirakan menjadi kurang lebih dua kali lipat dari jumlah tersebut berada di Kabupaten Kampar. Perkembangan yang begitu pesat baik dalam bentuk PMDN maupun PMA termasuk perkebunan rakyat yang tumbuh secara tidak terkendali. Ironisnya perkembangan luas lahan ini telah mengganggu ekosistem dan merusak hutan hingga ke hutan lindung, Perkebunan kelapa yang merupakan sub-sektor unggulan pada era sebelumnya masih berkembang dengan luas tanaman kurang lebih 543 ribu hektar, sedangkan karet kurang lebih 529 ribu hektar. Sedangkan sub-sektor lainnya seperti; pinang, kopi dan cengkeh jumlah relatif relatif kecil.

Sub-sektor peternakan masih didominasi oleh peternakan sapi, kerbau dan kambing. Pada tahun 2008 tercatat masing-masing jumlah kambing, sapi dan kerbau yakni 240.809 ekor, 160.502 dan 49.116 ekor sedangkan domba dan babi relatif kecil. Penyebaran sub-sektor peternakan yang dominan tersebut berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu. Sungguhpun demikian jenis peternakan yang dominan ini berada hampir di setiap kabupaten. Peternakan domba tidak terdapat di Kota Pekanbaru dan Dumai, sedangkan peternakan babi tidak terdapat di Kabupaten Kuantan Singingiyang terbesar berada di Kota Dumai. Jenis peternakan lain yang dikembangkan adalah ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung dan itik. Ayam ras petelur pada tahun 2008 tercatat 592.404

ekor, ayam ras pedaging sebanyak 30.679.920 ekor, ayam kampung sebanyak 3.466.760 ekor dan itik sebanyak 293.203 ekor. Jenis unggas yang dikembangkan di propinsi Riau sebagian besar berada di Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Khusus untuk ayam kampung sebagian besar berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Sedangkan peternakan itik sebagian besar banyak dikembangkan dikembangkan di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.

Sub-sektor industri yang terdiri dari 11 jenis industri yang ada di Propinsi Riau, maka industri makanan dan minuman memberikan kontribusi yang relatif tinggi dilihat dari jumlah perusahaan, tenaga kerja, nilai tambah yang dihasilkan. Dilihat dari jumlah perusahaan memberikan kontribusi sebesar 54,78 persen, tenaga kerja sebesar 53,80 persen dan dari nilai tambah sebesar 57,79 persen. Data ini memberikan gambaran kepada kita bahwa potensi industri kecil makanan dan minuman cukup besar dan patut mendapat perhatian dalam pengembangannya.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Hadirin yang saya hormati,

Menelaah laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau pada hakekatnya memperhatikan sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi dan keunggulan dari berbagai sektor yang ada. Mengingat luasnya program pemberdayaan berbagai sektor ekonomi yang ada di Propinsi Riau maka program pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks ini hanya diambil dari sektor industri kecil makanan dan minuman yang terdapat di 4 kabupaten/kota di Propinsi Riau yang dijadikan sampling terpilih yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.

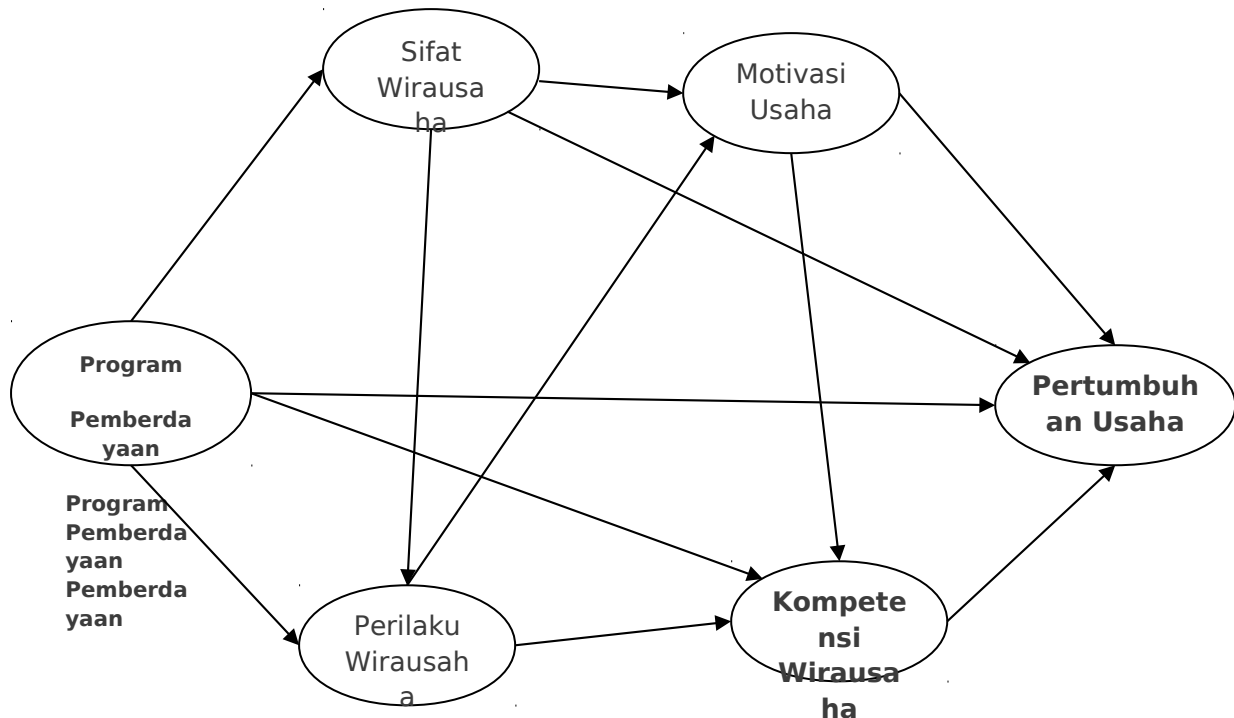
Indikator potensi ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan pertumbuhan sektor perekonomian yang dibagi kedalam sembilan sektor perekonomian yang terdapat dalam PDRB. Sembilan sektor tersebut adalah (1) sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; (2) sektor pertambangan dan penggalan; (3) sektor industri pengolahan; (4)

sektor listrik, gas dan air bersih; (5) sektor bangunan; (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) sektor jasa-jasa.

Berdasarkan data PDRB terlampir dapat dihitung besarnya sumbangan-sumbangan masing-masing sektor. Semakin besar sumbangan suatu sektor menggambarkan besarnya potensi dan merupakan unggulan dari suatu struktur perekonomian Propinsi Riau. Demikian pula sebaliknya sektor-sektor yang relatif kecil sumbangannya terhadap PDRB dapat dijadikan dasar untuk melakukan berbagai kebijakan. Sektor-sektor perekonomian yang secara signifikan menggerakkan perekonomian Propinsi Riau diantaranya; sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian pada umumnya dan sektor industri pengolahan, sedangkan sektor lainnya relatif kecil sumbangannya kecuali sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk sektor bangunan.

Pertumbuhan masing-masing sektor menggambarkan pertumbuhan sektor masing-masing kabupaten/kota, walaupun pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum menunjukkan potensi ekonomi secara spesifik yang ada pada suatu daerah. Oleh karena itu masing sektor harus diturunkan lagi menjadi bidang usaha dan jenis produk yang dihasilkan suatu sektor atau sub-sektor di suatu daerah. Misalnya sektor industri pengolahan, meliputi bidang usaha dan jenis produk yang dihasilkan yang menjadi unggulan seyogianya dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengetahui bidang usaha dan jenis produk unggulan akan lebih mudah untuk mengetahui potensi dan produk unggulan yang akan dikembangkan disuatu daerah, misalnya pertumbuhan industri kecil makanan di Kota Pekanbaru sepatutnya mendapat perhatian karena jumlahnya semakin banyak dan variatif. Dengan demikian kebijakan dan program pembangunan diarahkan dan dikembangkan untuk masing-masing daerah menjadi lebih unggul karena didukung oleh sumber bahan baku yang memadai dan tepat sasaran.

Penelitian pengembangan industri kecil makanan di propinsi Riau dapat dilihat dari berbagai perspektif sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Berikut ini :



Gambar 2. Model Kerangka Konseptual Penelitian

Fokus pembahasan penelitian ini meliputi tiga besaran yang dibahas yakni program pemberdayaan, kompetensi wirausaha dan pertumbuhan usaha. Dengan kata lain variabel tersebut akan diuji melalui faktor yang mempengaruhinya. Melalui pendekatan sistim dapat diketahui sejauh mana peran perantara atau efek tidak langsung variabel pemediasi terhadap hubungan langsung antara variabel program pemberdayaan (eksogen) dengan kompetensi wirausaha dan pertumbuhan usaha (endogen).

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Riau saat ini adalah bagaimana membangun dan mengembangkan suatu sistim bagi program pemberdayaan yang efektif agar bermanfaat bagi usaha kecil dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Program yang telah banyak mengeluarkan pembiayaan seharusnya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan usaha kecil. Sebagai suatu program prioritas yang menjadi agenda pembangunan Propinsi Riau khususnya pemberdayaan usaha kecil masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Dalam prakteknya program pemberdayaan

banyak yang mengalami kegagalan, bilamana tidak dikelola dengan baik. Kaplan (1991), menyarankan bahwa kegagalan pemberdayaan melingkupi bagian dari perilaku.

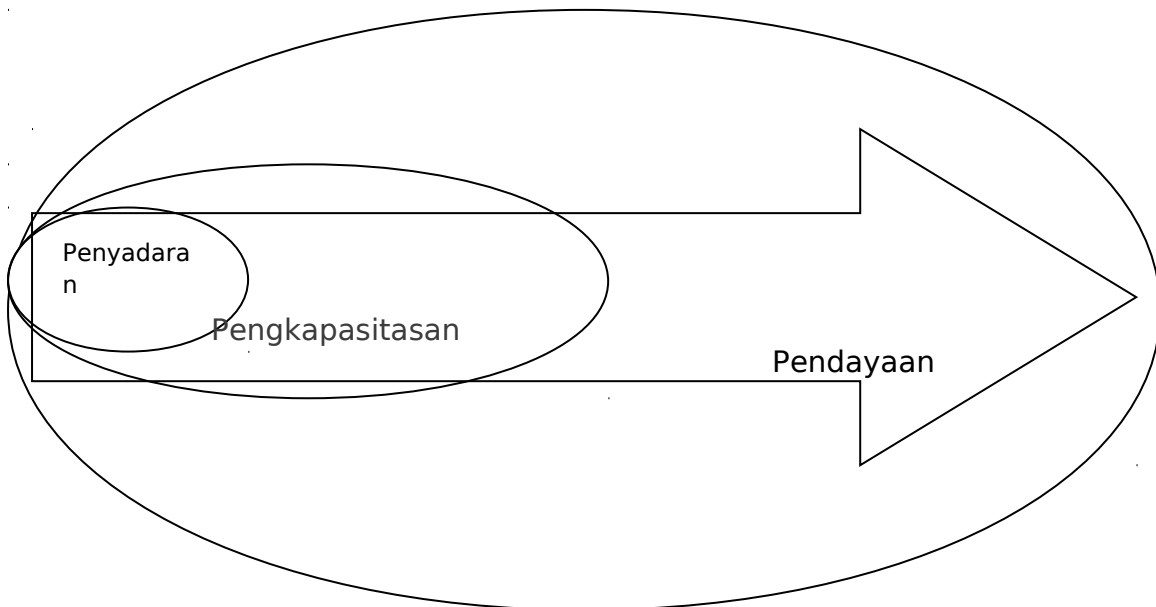
Penelitian tentang pemberdayaan masih relatif terbatas terutama yang terkait dengan pertumbuhan usaha kecil. Beberapa penelitian yang membahas tentang pemberdayaan diantaranya; Rose *et al.*, (2006), Rapp *et al.*, (2006), Morley (1995) dan C. Smith *et al.*, (1998); Yusuf (1995); Dana (1987)

D. TINJAUAN TEORITIS : PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep yang paling sering digunakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Seringkali pemahaman tentang pemberdayaan selalu mempersalinggantikan, memang tidak ada pemahaman yang benar secara absolut, tetapi upaya untuk memahami suatu konsep dengan baik merupakan langkah awal sebuah program pembangunan yang baik.

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran, tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Tahap kedua adalah pengkapasitasan yang sering kita sebut “*capacity building*”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu lebih dahulu. Memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Tahap ketiga adalah pendayaan yakni proses pemberian daya

atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.(Wrihatnolo dan Riant, 2007). Proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini



Gambar 3. Tiga Tahapan Pemberdayaan

Konsep "*empowerment*" (pemberdayaan) muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan bukanlah alat ukur dan hasil kerja ilmu-

ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan akan merasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah gejala kegagalan dan harapan. Dengan demikian, “pemberdayaan masyarakat”, pada hakikatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual (Friedmann, 1992).

Konsep “*empowerment*” sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas sebab “*civil society*” akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun, Friedmann juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “*civil society*”. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas, namun juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional (Friedmann, 1992). Selanjutnya Friedmann menyatakan bahwa konsep “*empowerment*” merupakan hasil kerja proses interaktif baik tatanan ideologis maupun pada tataran implementasi. Pada tataran ideologis, konsep “*empowerment*” merupakan hasil interaksi antara konsep “*top down-bottom up*”, antara *growth strategy* dan *people-centered strategy*”. Pada tataran implementasi, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antara otonomi.

Usman (1995) menjelaskan bahwa dalam pengertian terminologis, pemberdayaan (*empowerment*) dapat didefinisikan sebagai “upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat”. Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur “partisipasi” yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Pearse dan Stiefel (1979) sendiri lebih cenderung memberikan istilah “pemberdayaan partisipatif”, yang mengandung bentuk-bentuk seperti: menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuasaan dan peningkatan kemandirian.

Freire (1992) lebih jauh menjelaskan bahwa proses pemberdayaan merupakan metode yang berusaha mengubah persepsi termasuk mengubah motivasi atau dorongan seseorang dalam lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi/dorongan dalam diri seseorang, sebenarnya diperlukan “intervensi” atau “stimulasi” yang berasal dari luar, seperti rangsangan/stimulasi dana bantuan dari pemerintah, lingkungan yang terkait dengannya dan lain-lain. Hal ini karena motivasi seseorang dapat berkembang tidak lepas dari “kemampuan” seseorang yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja/keterampilan kerja, lingkungan kerja dan budaya yang melekat pada masyarakat tersebut.

Prijono dan Pranarka (1996), menyatakan konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan

dalam proses dan gerak aktualisasi eksistensinya. Maka perhatian gerakan pemberdayaan terutama adalah berusaha menciptakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap manusia untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Untuk itu perhatian gerakan pemberdayaan juga memusatkan perhatian pada kendala serta hambatan yang menjadi penghambat bagi tugas aktualisasi eksistensi tersebut. Dengan demikian, gerakan pemberdayaan menjadi gerakan perjuangan kebudayaan, yaitu perjuangan untuk menciptakan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, hukum, keluarga bahkan pribadi yang memberikan kemungkinan bagi setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya aktualisasi eksistensi manusia.

Salim Siagian (2001) menyatakan, ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak pada suatu negara atau daerah yang pada umumnya dalam keadaan tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata. Pengeritan lain, ekonomi rakyat (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (*people's economy is indigeneous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (*external economy*). Yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu.

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa perekonomian rakyat atau ekonomi rakyat erat kaitannya dengan para pelaku ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi yang melingkupi kegiatan ekonomi rakyat tersebut adalah sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan sebuah keluarga atau orang per orang. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat seperti ini merupakan perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas.

Sistim ekonomi kerakyatan adalah sistim ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat ke dalam proses pembangunan. Adapun cakupan dalam sistim ekonomi kerakyatan tersebut adalah mengenai administrasi pembangunan nasional, mulai dari sistim perencanaan hingga sistim pemantauan dan pelaporan. Karena itu sistim ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah demokrasi ekonomi. Di alam Indonesia, demokrasi ekonomi dikembangkan berdasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Dari pemahaman diatas dapat dipahami bahwa antara ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan adalah berbeda. Bila ekonomi rakyat menyangkut kelompok masyarakat yang aktivitasnya tumbuh lambat. Sedangkan ekonomi kerakyatan menyangkut sisim ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara.

Selain itu, sistim ekonomi kerakyatan juga menyangkut dua aspek, yakni aspek keadilan atau demokrasi ekonomi dan keberpihak pada ekonomi rakyat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, dan berperilaku adil bagi seluruh masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam sistim ini adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas warga masyarakat. Sistim ekonomi seperti ini lebih bersifat *process oriented*, bukan *goal oriented*.

Program Ekonomi Kerakyatan adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun berdasarkan kepentingan pembangunan serta diarahkan kepada pelaku ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) termasuk usaha mikro (Zulkarnain, 2006). Keberanian kita mencanangkan sistim ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistim ekonomi harus diiringi dengan berbagai tindakan dan keberpihakan karena pelaku ekonomi sistim ini memiliki banyak kelemahan baik dalam hal kualitas SDM, pembiayaan usaha, penguasaan teknologi, penguasaan jaringan pasar termasuk kualitas produksi yang dihasilkan sehingga berdampak kepada rendahnya daya saing. Oleh karena itu memang diperlukan berbagai langkah strategis agar ekonomi rakyat dapat tumbuh secara wajar. *Pertama*; perkuatan terhadap tatanan yuridis formal baik dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Keppres, Inpres termasuk Peraturan Daerah yang dapat memberikan dukungan,

perlindungan dan kepastian berusaha bagi pelaku ekonomi rakyat. *Kedua*; perkuatan dalam hal pembiayaan UMKM baik dalam bentuk pembiayaan dari Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, maupun penyebaran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat menyentuh kondisi UMKM yang serba lemah. *Ketiga*; perkuatan terhadap peningkatan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi rakyat dalam bentuk pendidikan dan latihan yang kesinambungan dan menyebar hingga tingkat pedesaan, agar secara bertahap dapat meningkatkan keterampilannya dalam berusaha. *Keempat*; perkuatan terhadap penguasaan jaringan pasar dan hubungan kemitraan yang hakiki. Dalam konteks ini memang diperlukan penguasaan jaringan dan informasi pasar yang terintegrasi agar produk-produk dapat dijual baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Hubungan kemitraan selayaknya tidak lagi semu, melainkan benar-benar didasarkan atas kepentingan semua pihak yang bermitra atas dasar prinsip kemitraan yakni saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling ketergantungan. Hal inipun harus didukung oleh peraturan yang memadai dan mengikat sebagaimana yang dilaksanakan oleh negara-negara lainnya dalam menjalankan konsepsi ini. *Kelima*; adanya *political will* yang kuat dan konsisten dari pemerintah agar tujuan untuk menggerakkan dan membangun ekonomi rakyat benar-benar dapat direalisasikan, tentunya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan terprogram dengan baik.

Melly G. Tan (2002), menyatakan bahwa mengembangkan Ekonomi Rakyat, menyangkut semua aspek dalam kehidupan masyarakat harus dilibatkan dan mengalami dampaknya, karena mencakup proses transformasi keseluruhan masyarakat. Aloysius Gunadi Brata menyatakan bahwa Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Kompas, 14/12/2001). Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian.

E. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Penelitian industri kecil makanan di Propinsi Riau dilakukan di 4 kabupaten/kota dengan sampel sebanyak 150 pengusaha kecil yang menjadi sampel penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan dengan analisis faktor konfirmatori (*CFA*). Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu bahwa instrumen penelitian disebut valid unidimensional jika nilai *GFI* > 0,90 (Jorskog & Sorbom, 1989; Ferdinand, 2002) dan reliabel jika nilai *construct reliability* (ρ_{η}) > 0,70 (Nunally & Bernstein, 1994; Ferdinand, 2002).

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen untuk masing-masing variabel dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	GFI	Construct Reliability
Program Pemberdayaan (X_1)	1,000	0,774
Sifat Wirausaha (Y_1)	0,975	0,769
Perilaku Wirausaha (Y_2)	1,000	0,704
Motivasi Usaha (Y_3)	1,000	0,709
Kompetensi Wirausaha (Y_4)	0,994	0,744
Pertumbuhan Usaha (Y_5)	1,000	0,722

Sumber : Data diolah, tahun 2007

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel di atas adalah valid karena nilai *GFI* di atas 0,9, dan reliabel karena nilai *construct reliability* di atas 0,7.

2. Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil analisis deskriptif berupa persentase dari masing-masing indikator untuk setiap variabel disajikan pada Lampiran 3. Variabel yang akan dideskripsikan pada sub bab ini meliputi Program Pemberdayaan (X_1), Sifat Wirausaha (Y_1), Perilaku Wirausaha (Y_2), Motivasi Usaha (Y_3), Kompetensi Wirausaha (Y_4), dan Pertumbuhan Usaha (Y_5). Secara ringkas hasil analisis deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Deskripsi Variabel Program Pemberdayaan (X_1)

Skor	Pembiayaan ($X_{1.1}$)	Pembinaan ($X_{1.2}$)	Kemitraan ($X_{1.3}$)
1	0,7	2,0	0,0
2	0,7	7,3	0,7
3	10,7	15,3	11,3
4	32,0	39,3	41,3
5	56,0	36,0	46,7
Mean Indikator	4,42	4,00	4,34
Mean Variabel	4,25		

Sumber : Data diolah, tahun 2007

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Program Pemberdayaan dipersepsi positif oleh responden. Responden memberikan persepsi baik, hal ini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata skor di atas 4 (setuju), yaitu 4,25. Dari tabel tersebut diatas jelas bahwa dimensi pembiayaan memiliki skor yang paling tinggi (4,42), kemudian indikator kemitraan usaha (4,34) dan yang paling rendah adalah dimensi pembinaan (4,00). Dapat disimpulkan bahwa dimensi pembiayaan memegang peranan penting dalam program pemberdayaan karena sebagian besar usaha kecil masih kekurangan modal usaha. Disisi lain dimensi pembinaan terutama yang terkait dengan pendidikan dan latihan harus mendapat perhatian agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia usaha kecil di Propinsi Riau.

Tabel 4. Deskripsi Variabel Sifat Wirausaha (Y_1)

Skor	Percaya Diri ($Y_{1.1}$)	Kreativitas dan Inovasi ($Y_{1.2}$)	<i>Personal Traits</i> ($Y_{1.3}$)	Beorientasi Tugas & Hasil ($Y_{1.4}$)
------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

1	0,0	0,7	0,0	0,7
2	0,7	5,3	4,0	1,3
3	4,7	7,3	7,3	10,0
4	21,3	28,7	33,3	30,7
5	73,3	58,0	55,3	57,3
Mean Indikator	4,67	4,38	4,40	4,43
Mean Variabel	4,47			

Sumber : Data diolah, tahun 2007

Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Sifat Wirausaha dipersepsi positif oleh responden. Responden memberikan persepsi baik, hal ini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata skor di atas 4 (setuju), yaitu 4,47. Dari tabel tersebut diatas jelas bahwa indikator percaya diri memiliki skor yang paling tinggi (4,67), berorientasi tugas dan hasil (4,43), kepemimpinan (4,40) dan yang paling rendah adalah kreativitas dan inovasi (4,38). Kepercayaan diri dalam berusaha termasuk kepribadian yang mantap merupakan modal dasar yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Kreativitas dan inovasi harus mendapat perhatian dengan cara mengembangkan produk baru melalui diversifikasi produk, kemitraan dengan pihak ketiga, selalu berfikir kreatif untuk menciptakan gagasan dan ide baru dalam berbisnis karena bagian bagian terpenting bagi sifat wirausaha.

Tabel 5. Deskripsi Variabel Perilaku Wirausaha (Y₂)

Skor	Budaya (Y _{2.1})	Diklat (Y _{2.2})
1	3,3	0,7
2	10,0	2,7
3	25,3	14,7
4	39,3	41,3
5	22,0	40,7
Mean Indikator	3,67	4,19
Mean Variabel	3,93	

Sumber : Data diolah, tahun 2007

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel Perilaku Wirausaha dipersepsi positif oleh responden. Responden memberikan persepsi baik, hal ini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata skor adalah 4 (setuju), yaitu 3,93. Dari tabel tersebut diatas jelas bahwa indikator pendidikan memiliki skor tinggi (4,19) dan budaya memiliki skor rendah (3,67). Dapat disimpulkan

bahwa dimensi pendidikan dan latihan dapat memberikan kontribusi membentuk perilaku wirausaha baik pendidikan formal, kursus-kursus dan pelatihan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan. Budaya wirausaha yang terbentuk dari lingkungan keluarga karena faktor keturunan belum memberikan kontribusi yang berarti, melainkan diperlukan dorongan dari luar untuk memasyarakatkan dan pentingnya berwirausaha untuk meraih keberhasilan usaha. Disisi lain lingkungan usaha juga sangat menentukan dengan memasyarakatkan kewirausahaan di lingkungan masyarakat.

Tabel 6. . Deskripsi Variabel Motivasi Usaha (Y₃)

Skor	Kebutuhan Berprestasi (Y _{3.1})	Visi Pertumbuhan (Y _{3.2})
1	0,0	0,0
2	0,7	0,0
3	12,7	8,0
4	44,0	28,0
5	42,7	64,0
Mean Indikator	4,29	4,56
Mean Variabel	4,42	

Sumber : Data diolah, tahun 2007

Tabel 6. menunjukkan bahwa variabel Motivasi Usaha dipersepsi positif oleh responden. Responden memberikan persepsi baik, hal ini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata skor di atas 4 (setuju), yaitu 4,42. Dari tabel tersebut diatas dimensi visi pertumbuhan memiliki skor tinggi (4,56) dan kebutuhan berprestasi memiliki skor rendah (4,29). Visi pertumbuhan berusaha mencapai dan meningkatkan laba serta impian dan tujuan yang jelas. Adanya keinginan dan cita-cita usaha kecil untuk maju dan berkembang untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang. Kebutuhan berprestasi yang perlu mendapat perhatian adalah cukup puas dengan apa yang diraih saat ini merupakan indikator yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Tabel 7. Deskripsi Variabel Kompetensi Wirausaha (Y₄)

Skor	Koqnitif (Y _{4.1})	Kepemimpinan (Y _{4.2})	Pengetahuan (Y _{4.3})	SDM (Y _{4.4})
1	0,0	0,0	0,0	0,0

2	0,7	1,3	10,0	4,0
3	32,7	39,3	43,3	26,0
4	55,3	36,7	31,3	50,7
5	11,3	22,7	15,3	19,3
Mean Indikator	3,77	3,81	3,52	3,85
Mean Variabel	3,74			

Sumber : Data diolah, tahun 2007

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Wirausaha dipersepsi positif oleh responden. Responden memberikan persepsi baik, hal ini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata skor adalah 4 (setuju), yaitu 3,74. Dari tabel tersebut diatas dimensi kompetensi sumber daya manusia memiliki skor tinggi (3,85), kepemimpinan (3,81), kognitif (3,77) dan pengetahuan memiliki skor rendah (3,52). Kompetensi pengetahuan yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan kemampuan untuk mengendalikan dan mengembangkan usaha, pengambilan keputusan, memecahkan persoalan, dan mendorong kinerja karyawan.

Tabel 8. Deskripsi Variabel Pertumbuhan Usaha (Y₅)

Skor	Penjualan (Y _{5.1})	Laba (Y _{5.2})
1	1.3	0.7
2	7.3	9.3
3	22.7	26.7
4	42.7	38.0
5	26.0	25.3
Mean Indikator	3.85	3.78
Mean Variabel	3,81	

Sumber : Data diolah, tahun 2007

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Usaha dipersepsi positif oleh responden. Responden memberikan persepsi baik, hal ini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata skor adalah 4 (setuju), yaitu 3,81. Dari tabel tersebut diatas pertumbuhan penjualan memiliki skor tinggi (3,85) dan laba memiliki skor rendah (3,78). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah upaya meningkatkan laba melalui peningkatan penjualan.

Hampir secara keseluruhan variabel di persepsi positif oleh responden, walaupun sebagian masih memiliki nilai rata-rata dan perlu mendapat perhatian agar program

pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terselenggara dengan baik dan mencapai sasaran yang dikehendaki.

3. Hasil Pengujian Asumsi SEM

Terdapat beberapa pengujian asumsi yang dilakukan dalam SEM, yaitu normalitas dan linieritas sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Asumsi normalitas multivariate diuji dengan bantuan *software* AMOS 6, menunjukkan bahwa secara *multivariate* data tidak berdistribusi normal. Hal ini diindikasikan pada nilai *critical ratio* sebesar 7,011, dengan nilai kritis Z_{hitung} untuk α 5% adalah sebesar 1,96. Karena hampir seluruh nilai CR > 1,96 maka asumsi normalitas *multivariate* tidak dipenuhi. Namun demikian, berdasarkan dalil limit pusat jika sampel semakin besar maka statistik akan berdistribusi normal. Dengan besar sampel $n = 150$, maka data pada studi disertasi ini dipandang sudah memenuhi dalil limit pusat, sehingga asumsi normalitas data tidak bersifat kritis dan dapat diabaikan.

2. Uji Linieritas

Pengujian asumsi linieritas dilakukan dengan metode *Curve Fit*, dihitung dengan bantuan *software* SPSS, Hasilnya linieritas disajikan pada Lampiran 4. Rujukan yang digunakan adalah prinsip *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logaritmik*, *power*, *compound*, *growth*, dan eksponensial. bahwa seluruh hubungan adalah linier.

Tabel 9. Hasil Pengujian Asumsi Linieritas

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Hasil Pengujian ($\alpha = 0,05$)	Keputusan
Program Pemberdayaan (X_1)	Sifat Wirausaha (Y_1)	Model linier signifikan	Linier
Program Pemberdayaan (X_1)	Perilaku Wirausaha (Y_2)	Model linier signifikan	Linier
Sifat Wirausaha (Y_1)	Perilaku Wirausaha (Y_2)	Model linier signifikan	Linier
Sifat Wirausaha (Y_1)	Motivasi Usaha (Y_3)	Model linier signifikan	Linier
Perilaku Wirausaha (Y_2)	Motivasi Usaha (Y_3)	Model linier signifikan	Linier
Program Pemberdayaan (X_1)	Kompetensi Wirausaha (Y_4)	Model linier signifikan	Linier
Perilaku Wirausaha (Y_2)	Kompetensi Wirausaha (Y_4)	Model linier signifikan	Linier
Motivasi Usaha (Y_3)	Kompetensi Wirausaha (Y_4)	Model linier signifikan	Linier
Program Pemberdayaan (X_1)	Pertumbuhan Usaha (Y_5)	Model linier signifikan	Linier
Sifat Wirausaha (Y_1)	Pertumbuhan Usaha (Y_5)	Model linier signifikan	Linier
Motivasi Usaha (Y_3)	Pertumbuhan Usaha (Y_5)	Model linier signifikan	Linier
Kompetensi Wirausaha (Y_4)	Pertumbuhan Usaha (Y_5)	Model linier signifikan	Linier

4. Structural Equation Modelling (SEM)

Penggunaan alat analisis SEM, selain didasarkan pada kerumitan model yang digunakan, juga karena adanya keterbatasan alat analisis

MEASURE OF FIT
 RMSEA=.039
 AGFI=.879
 CFI=.948
 TLI=.933
 Khi kuadrat=130.659
 Khi kuadrat/DF=1.221
 Probabilitas=.151
 p value=.060

lainnya, seperti; *multiple regression*, *factor analysis* dan lainnya. Augusty (2005) menyarankan untuk menganalisis masalah-masalah rumit tersebut, maka teknik SEM sebagai sebuah perluasan atau kombinasi dari beberapa teknik *multivariate*, merupakan sebuah jawaban yang tepat. Solimun (2005) menyatakan bahwa SEM merupakan pendekatan yang terintegrasi antara analisis data dan konstruksi konsep. Dengan menggunakan SEM peneliti dapat melakukan pengujian model struktur hubungan antar variabel yang telah ada dasar teorinya ataupun pengembangan struktur hubungan baru sehingga diperoleh model baru yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

5.5 Loading Factors

Tabel 10. Loading Factors (λ) Pengukuran Variabel Pembentuk Model

Pengaruh	Indikator	dan	Konstruk	Loadig Factor	T-hitung	Prob	Keterangan
Program Pemberdayaan	X11 (Pembiayaan)	<--	PPE	0,672	fix		Signifikan
	X12 (Pembinaan)	<--	PPE	0,524	4.181	<0,001	Signifikan
	X13 (Kemitraan Usaha)	<--	PPE	0,582	4.337	<0,001	Signifikan
Sifat Wirausaha	Y11 (Kepercayaan Diri)	<--	Sifat_Wirausaha	0,575	fix		Signifikan
	Y12 (Kreativitas&Inovasi)	<--	Sifat_Wirausaha	0,656	4.937	<0,001	Signifikan
	Y13 (<i>Personal Traits</i>)	<--	Sifat_Wirausaha	0,504	4.311	<0,001	Signifikan
	Y14 (Orientasi Tugas&Hasil)	<--	Sifat_Wirausaha	0,410	3.715	<0,001	Signifikan
Perilaku Wirausaha	Y21 (Budaya)	<--	Perilaku_Wirausaha	0.736	4.631	fix	Signifikan
	Y22 (Pendidikan dan Latihan)	<--	Perilaku_Wirausaha	0,631	Fix	<0,001	Signifikan
Motivasi Usaha	Y31 (Kebutuhan Berprestasi)	<--	Motivasi_Usaha	0,559	5.252	fix	Signifikan
	Y32 (Visi Pertumbuhan)	<--	Motivasi_Usaha	0,730	Fix	<0,001	Signifikan
Kompetensi Wirausaha	Y41 (Kompetensi Kognitif)	<--	Kompetensi_Wirausaha	0,512	Fix	fix	Signifikan
	Y42 (Kompetensi Kepemimpinan)	<--	Kompetensi_Wirausaha	0,634	4.769	<0,001	Signifikan
	Y43 (Kompetensi Pengetahuan)	<--	Kompetensi_Wirausaha	0,503	4.212	<0,001	Signifikan
	Y44 (Kompetensi Sumberdaya Manusia)	<--	Kompetensi_Wirausaha	0,462	3.992	<0,001	Signifikan
Pertumbuhan	Y51 (Pertumbuhan)	<--	Pertumbuhan	0.674	6.539	fix	Signifikan

Usaha	Penjualan)		Usaha				
	Y52 (Pertumbuhan Laba)	<--	Pertumbuhan Usaha	0,682	Fix	<0,001	Signifikan

Sumber : Data diolah

5.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Model teoritis pada kerangka konseptual penelitian, dikatakan *fit* jika didukung oleh data empirik, hasil analisis SEM secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil pengujian *goodness of fit overall model*, guna mengetahui apakah model hipotetik didukung oleh data empirik, diberikan pada tabel 11. berikut ini :

Tabel 11. Hasil Pengujian *Goodness Of Fit Overall Model*

Kriteria	Cut-of value	Hasil Model	Keterangan
Khi Kuadrat	Kecil	130,659	Model Baik
p-value	$\geq 0,05$	0,060	
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,221	Model Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,916	Model Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,879	Model Hampir Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,933	Model Hampir Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,948	Model Hampir Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,039	Model Baik

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian *Goodness of Fit Overall* berdasarkan Tabel 11, dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh kriteria hampir seluruhnya menunjukkan model baik, terutama dilihat dari CMIN/DF dan RMSEA. Oleh karena itu model cocok untuk digunakan.

Tabel 12. berikut ini menyajikan koefisien jalur pengaruh dan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung sebagai berikut :

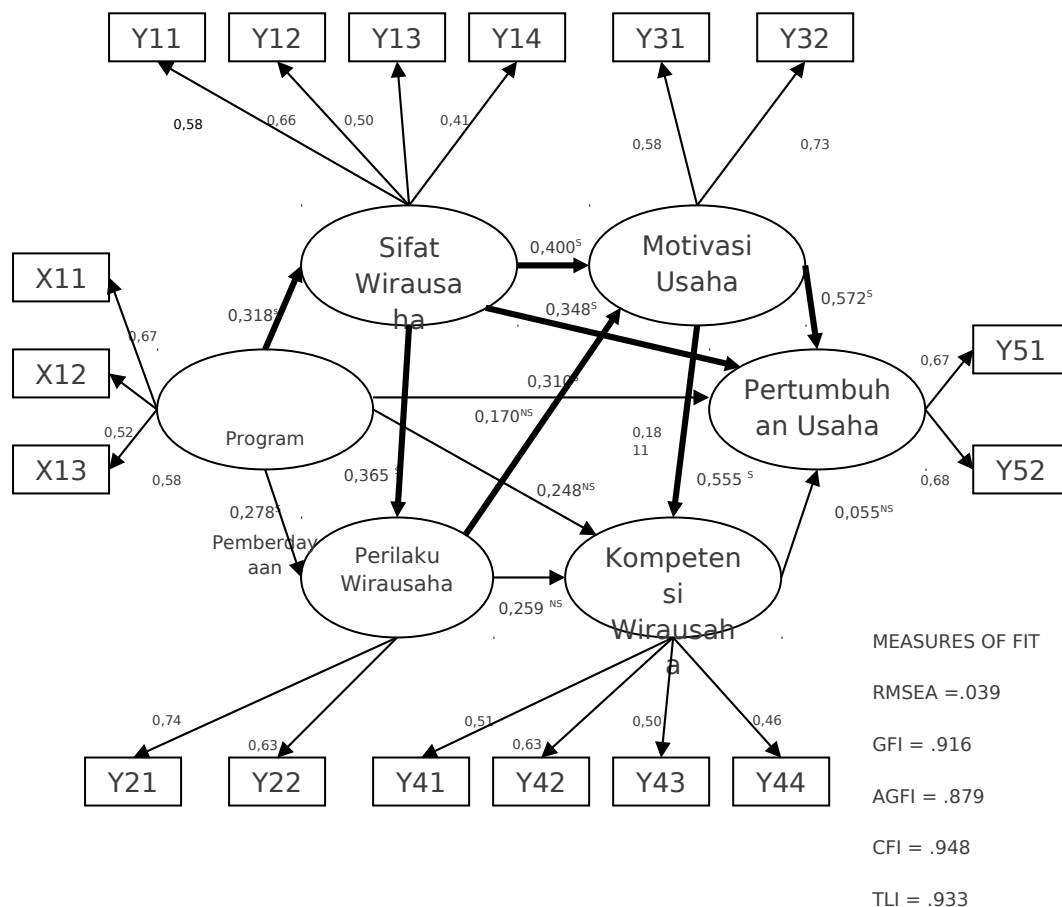
Tabel 12. Koefisien Jalur Pengaruh Langsung dan Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien Jalur	p-value	Keterangan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Sifat Wirausaha (Y ₁)	0,318	0,023	Signifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Perilaku Wirausaha (Y ₂)	0,273	0,057	Nonsignifikan
Sifat Wirausaha (Y ₁)	Perilaku Wirausaha (Y ₂)	0,365	0,014	Signifikan
Sifat Wirausaha (Y ₁)	Motivasi Usaha (Y ₃)	0,400	0,010	Signifikan
Perilaku Wirausaha (Y ₂)	Motivasi Usaha (Y ₃)	0,310	0,036	Signifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Kompetensi Wirausaha (Y ₄)	0,248	0,069	Nonsignifikan
Perilaku Wirausaha (Y ₂)	Kompetensi Wirausaha (Y ₄)	0,259	0,115	Nonsignifikan
Motivasi Usaha (Y ₃)	Kompetensi Wirausaha (Y ₄)	0,555	0,003	Signifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,170	0,257	Nonsignifikan
Sifat Wirausaha (Y ₁)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,348	0,026	Signifikan
Motivasi Usaha (Y ₃)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,572	0,048	Signifikan

Kompetensi Wirausaha (Y ₄)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,055	0,848	Nonsignifikan
--	-------------------------------------	-------	-------	---------------

Keterangan: *** = $p < 0,001$

Hasil pengujian hipotesis jalur-jalur pengaruh langsung juga dapat dilihat pada gambar 5 diagram jalur sebagai berikut:



Gambar 5 : Uji Model Program Pemberdayaan dan Pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha kecil di Propinsi Riau

Khi kuadrat = 130.659

Khi kuadrat/DF = 1.221

p_value = .060

Tabel 13. Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung dan Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Bebas	Variabel Antara	Variabel Terikat	Koefisien Jalur	Keterangan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Sifat Wirausaha (Y ₁), Motivasi Usaha (Y ₃)	Kompetensi Wirausaha (Y ₄)	0,071	Signifikan

Program Pemberdayaan (X ₁)	Sifat Wirausaha (Y ₁), Perilaku Wirausaha (Y ₂), Motivasi Usaha (Y ₃)	Kompetensi Wirausaha (Y ₄)	0,020	Signifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Perilaku Wirausaha (Y ₂),	Kompetensi Wirausaha (Y ₄)	0,071	Nonsignifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Sifat Wirausaha (Y ₁),	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,111	Signifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Sifat Wirausaha (Y ₁), Motivasi Usaha (Y ₃)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,073	Signifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Sifat Wirausaha (Y ₁), Perilaku Wirausaha (Y ₂), Motivasi Usaha (Y ₃)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,021	Signifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Kompetensi Wirausaha (Y ₃)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,014	Nonsignifikan
Program Pemberdayaan (X ₁)	Perilaku Wirausaha (Y ₂), Motivasi Usaha (Y ₃)	Pertumbuhan Usaha (Y ₅)	0,049	Signifikan

Sumber : Data diolah

Hipotesis 1: Program Pemberdayaan (X₁) berpengaruh langsung terhadap Kompetensi Wirausaha (Y₄)

Hasil analisis koefisien *path* pengaruh langsung antara variabel Program Pemberdayaan (X₁) terhadap Kompetensi Wirausaha (Y₄) diperoleh nilai 0,248 dengan *p-value* sebesar 0,069. Maka tidak terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis 1 bahwa “Program Pemberdayaan (X₁) berpengaruh langsung terhadap Kompetensi Wirausaha (Y₄)”.

Hipotesis 2: Program Pemberdayaan (X₁) berpengaruh tidak langsung terhadap Kompetensi Wirausaha (Y₄) melalui Sifat Wirausaha(Y₁) dan Motivasi Usaha (Y₃)

Hasil analisis koefisien *path* pengaruh tidak langsung antara variabel Program Pemberdayaan (X₁) terhadap Kompetensi Wirausaha (Y₄) melalui Sifat Wirausaha (Y₁) diperoleh melalui hasil kali antara pengaruh langsung

antara Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Sifat Wirausaha (Y_1) (koefisien 0,318 dan p -value 0,023) dengan pengaruh langsung antara Sifat Wirausaha (Y_1) terhadap Motivasi Usaha (Y_3) (koefisien 0,400 dan p -value 0,010). Motivasi Usaha (Y_3) terhadap Kompetensi Wirausaha (Y_4) (koefisien 0,555 dan p -value 0,003) Sehingga diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,71, dan ketiga jalur pengaruh langsung signifikan. Maka terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis 2 bahwa “Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Kompetensi Wirausaha (Y_4) melalui Motivasi Usaha (Y_3)”. Karena koefisien *path* bertanda positif (0,071), berarti hubungan kedua variabel ini adalah positif, artinya semakin baik program pemberdayaan, maka semakin tinggi pula kompetensi wirausaha melalui motivasi usaha.

Hipotesis 3: Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Kompetensi Wirausaha (Y_4) melalui Perilaku Wirausaha (Y_2)

Hasil analisis koefisien *path* pengaruh tidak langsung antara variabel Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Kompetensi Wirausaha (Y_4) melalui Perilaku Wirausaha (Y_2) diperoleh melalui hasil kali antara pengaruh langsung antara Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Perilaku Wirausaha (Y_2) (koefisien 0,273 dan p -value 0,057) dengan pengaruh langsung antara Perilaku Wirausaha (Y_2) terhadap Kompetensi Wirausaha (Y_4) (koefisien 0,259 dan p -value 0,115). Sehingga diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,071, dan jalur pengaruh langsung tidak signifikan. Maka tidak terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis 3 bahwa “Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak

langsung terhadap Kompetensi Wirausaha (Y_4) melalui Perilaku Wirausaha (Y_2)”.

Hipotesis 4: Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5)

Hasil analisis koefisien *path* pengaruh langsung antara variabel Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) diperoleh nilai 0,170 dengan *p-value* sebesar 0,257. Maka tidak terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis 4 bahwa “Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5)”.

Hipotesis 5: Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Kompetensi Wirausaha (Y_4)

Hasil analisis koefisien *path* pengaruh tidak langsung antara variabel Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Kompetensi Wirausaha (Y_4) diperoleh melalui hasil kali antara pengaruh langsung antara Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Kompetensi Wirausaha (Y_4) (koefisien 0,248 dan *p-value* 0,069) dengan pengaruh langsung antara Kompetensi Wirausaha (Y_4) terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) (koefisien 0,055 dan *p-value* 0,848). Sehingga diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,014, dan kedua jalur pengaruh langsung tidak signifikan. Maka tidak terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis 5 bahwa “Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Kompetensi Wirausaha (Y_4)”.

Hipotesis 6: Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Sifat Wirausaha (Y_1)

Hasil analisis koefisien *path* pengaruh tidak langsung antara variabel Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Sifat Wirausaha (Y_1) diperoleh melalui hasil kali antara pengaruh langsung antara Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Sifat Wirausaha (Y_1) (koefisien 0,318 dan *p-value* 0,023) dengan pengaruh langsung antara Sifat Wirausaha (Y_1) terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) (koefisien 0,348 dan *p-value* 0,026). Sehingga diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,111, dan jalur pengaruh langsung tidak signifikan. Maka terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis 6 bahwa “Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Sifat Wirausaha (Y_1)”. Karena koefisien path bertanda positif (0,137), berarti hubungan kedua variabel ini adalah positif, artinya semakin baik program pemberdayaan, maka semakin tinggi pula pertumbuhan usaha melalui sifat wirausaha.

Hipotesis 7: Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Motivasi Usaha (Y_3)

Hasil analisis koefisien *path* pengaruh tidak langsung antara variabel Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Motivasi Usaha (Y_3) diperoleh melalui hasil kali antara pengaruh langsung antara Program Pemberdayaan (X_1) terhadap Sifat Wirausaha (Y_2) (koefisien 0,318 dan *p-value* 0,023), Sifat Wirausaha (Y_2) terhadap Motivasi Usaha (Y_3) (koefisien 0,400 dan *p-value* 0,010) dengan pengaruh langsung antara Motivasi Usaha (Y_3) terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) (koefisien 0,572 dan *p-value* 0,048). Sehingga diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,073, dan ketiga jalur pengaruh langsung signifikan. Maka terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis

7 bahwa “Program Pemberdayaan (X_1) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Usaha (Y_5) melalui Motivasi Usaha (Y_3)”. Karena koefisien path bertanda positif (0,073), berarti hubungan kedua variabel ini adalah positif, artinya semakin baik program pemberdayaan, maka semakin tinggi pula pertumbuhan usaha.

Tabel 14. Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Pernyataan Hipotesis
Diterima/ Ditolak	No.	
Diterima	H2	Program Pemberdayaan → Motivasi Usaha → Kompetensi Wirausaha
	H6	Program Pemberdayaan → Sifat Wirausaha → Pertumbuhan Usaha
	H7	Program Pemberdayaan → Motivasi Usaha → Pertumbuhan Usaha
Ditolak	H1	Program Pemberdayaan → Kompetensi Wirausaha
	H3	Program Pemberdayaan → Perilaku Wirausaha → Kompetensi Wirausaha
	H4	Program Pemberdayaan → Pertumbuhan Usaha
	H5	Program Pemberdayaan → Kompetensi Wirausaha → Pertumbuhan Usaha

Sumber : Terdukung data empiris

Dari hasil perhitungan yang dipaparkan diatas jelas bahwa pelaksanaan program ekonomi rakyat harus mempertimbangkan beberapa variabel yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan. Program yang dilaksanakan juga harus dilandasi oleh perencanaan yang baik dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Penyelenggaraan program secara langsung prakteknya menimbulkan kerugian, artinya harus ditempuh langkah-langkah melalui pengembangan sifat wirausaha, motivasi usaha, perilaku wirausaha. Hasil pengujian juga menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memacu pertumbuhan usaha. Pola-pola

penyelenggaraan yang bersifat proyek dan pencapaian target seharusnya dilakukan evaluasi keberhasilannya. Dengan demikian sumber pembiayaan yang cukup besar dan telah dikeluarkan melalui APBD akan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Propinsi Riau belum dapat diaplikasikan dengan baik karena program tersebut dilaksanakan secara langsung tanpa adanya kajian yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program yang dapat mencapai sasaran yang dikehendaki sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan usaha dan kompetensi wirausaha yang diharapkan. Program pemberdayaan pada hakekatnya memiliki arti yang strategis bilamana pelaksanaannya diawali dengan suatu perencanaan yang matang baik dari segi pembiayaan, program pembinaan dan sasaran usaha potensial yang menyentuh pada akar permasalahan usaha kecil. Ternyata masih banyak hal yang harus diperbuat oleh pemerintah Propinsi Riau, jika ingin melakukan program pemberdayaan ini menjadi lebih baik dan berhasil guna. Asumsi awal yang dipersepsikan dalam program ini, bahwa pertumbuhan usaha kecil yang demikian pesat tidak sepenuhnya bersumber dari program pemberdayaan pemerintah, melainkan lebih dari adanya peluang dan keuletan usaha kecil merintis dan mengembangkan usahanya. Sehingga asumsi dan perbedaan ini menghasilkan temuan bahwasanya program pemberdayaan tersebut belum terlaksana secara efektif. Dengan kata lain

diperlukan evaluasi dan monitoring yang mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan usaha kecil di Propinsi Riau dapat dijadikan suatu pedoman untuk pengambilan keputusan tentang rencana program dimasa yang akan datang. Program pemberdayaan secara langsung tidak mampu meningkatkan kompetensi wirausaha dan pertumbuhan usaha. Sehingga program ini hanya dapat dilaksanakan dengan membentuk variabel sifat wirausaha, motivasi usaha dan perilaku wirausaha. Ketiga variabel antara ini berdasarkan hasil pengujian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan program pemberdayaan dimasa yang akan datang.

Secara lebih rinci, untuk masing-masing konstruk yang dihipotesiskan adalah sebagai berikut :

1. Variabel program pemberdayaan yang terdiri dari tiga indikator yaitu pembiayaan, pembinaan dan kemitraan usaha merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah masih bertumpu pada unsur pembiayaan. Padahal keberhasilan program juga ditentukan oleh faktor pembinaan dan kemitraan usaha. Sehingga program pemberdayaan tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dana (1987) Yusuf (1995), dan Morley (1995) Rose *et al.*, (2006),
2. Variabel kompetensi wirausaha yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil, lebih banyak ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan usaha kecil itu sendiri karena faktor kemandirian,

keuletan dan pengalaman, namun usaha yang dijalankan tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Baum (1995), Baum *et al.*, (2001), Sandjojo (2004) Rose *et al.*, (2006).

3. Variabel sifat wirausaha yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil ternyata bersumber dari kreativitas dan inovasi usaha kecil dalam mengembangkan usaha, sedangkan usaha yang dijalankan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian hasil tetapi menjalankan usaha tanpa adanya target dan sasaran yang jelas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Baum (1995), Baum *et al.*, (2001), Sandjojo (2004), Amirullah (2005), Gray (2005) dan Taormina (2007).
4. Variabel perilaku wirausaha ternyata tidak cukup kuat untuk membentuk kompetensi wirausaha, walaupun budaya wirausaha memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Budaya wirausaha dapat dinyatakan sebagai pembentuk perilaku wirausaha yang baik dan perlu dipertahankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Emilliani (2003) dan Lindsay (2005).
5. Variabel motivasi usaha yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha lebih banyak ditentukan oleh cita-cita pengusaha kecil untuk maju dan berkembang, namun disatu sisi tidak didukung oleh keberhasilan dan prestasi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Baum (1995), Baum *et al.*, (2001), Sandjojo (2004),

Amirullah (2005), Wiklund, Segal *et al.*, (2005) dan Severt *et al.*, (2006).

6. Variabel pertumbuhan usaha ternyata tidak dapat menghasilkan secara optimal. Kontribusi pertumbuhan laba jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan penjualan selama 3 tahun terakhir.
7. Program pemberdayaan yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah ternyata tidak mampu meningkatkan pertumbuhan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan berperan besar dalam menentukan keberhasilan usaha kecil dalam meningkatkan pertumbuhan usaha. Faktor pembinaan SDM menjadi amat strategis untuk diperhatikan melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah sesuai dengan kebutuhan usaha kecil itu sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pertumbuhan usaha sangat tergantung baiknya program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pertumbuhan usaha secara signifikan hanya dapat dilakukan bilamana pemerintah melakukan perencanaan, orientasi program dan kegiatan yang mengarah pada pembentukan sifat wirausaha dan motivasi usaha. Artinya, diperlukan tahapan-tahapan sebelum program tersebut dilaksanakan.

Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemerintah, maka diusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan pemerintah Propinsi Riau, maka diperlukan konsep yang terintegrasi terutama terkait dengan unsur pembinaan diantaranya; pendidikan dan

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil, pengembangan jaringan pasar dan penyediaan dan fasilitasi sumber-sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh usaha kecil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam penyelenggaraan program pemberdayaan diantaranya :

- a. Melakukan perubahan terhadap sistim pendidikan dan latihan dengan memperhatikan efektivitas program pembinaan yakni melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. Dengan kata lain tidak menyelenggarakan pelatihan yang tidak dibutuhkan usaha kecil yang berorientasi proyek.
- b. Melakukan perubahan struktur kelembagaan yang efisien dan efektif serta bertanggung jawab baik tentang kelembagaan kemitraan usaha. Pola kemitraan yang dilaksanakan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi usaha dengan pola Dagang Umum atau Keagenan. Kelembagaan pembinaan sebaiknya melibatkan institusi yang berkompeten yang menagai pembinaan sumber daya manusia. Dalam bidang pendidikan sebaiknya melibatkan Perguruan Tinggi, sedangkan praktek keterampilan dapat menggunakan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), Lembaga Latihan Swasta (LLS). Untuk penyelenggaraan kemitraan usaha disamping melibatkan Dinas/Instansi terkait juga dapat menggunakan peran *Business Development Service* (BDS) untuk memediasi kepentingan pengusaha kecil dengan pasar.

- c. Untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan usaha sangat diperlukan pembiayaan yang memadai baik yang bersumber dari dana pemerintah maupun dari lembaga keuangan lainnya. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan masih merupakan kendala yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan tentang sumber-sumber seperti; kredit usaha kecil yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan non bank.
- d. Melakukan perubahan pola berpikir (*mind-set*) pengusaha kecil dari pola berusaha yang bersifat sederhana dan tradisional menjadi usaha yang berbasis manajemen dan memiliki kompetensi melalui penambahan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pola pikir pengusaha kecil dapat dilakukan dengan pembinaan yang kontinyu dan terarah, misalnya mengikuti keterampilan teknis, manajemen usaha dan pengembangan bakat kewirausahaan. Secara keseluruhan perubahan pola pikir dilakukan dengan program pendidikan dan latihan, penambahan wawasan melalui pemagangan, studi banding dan belajar dari keberhasilan orang lain.
- e. Menanamkan sikap optimis bahwasanya usaha kecil tetap merupakan bagian penting dalam perekonomian dimasa yang akan datang. Pada hakekatnya usaha skala besar juga berasal dari usaha kecil. Oleh karena itu peran pemerintah berkewajiban mendorong dan memiliki kepedulian, memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dalam berbagai aspek yang dibutuhkan.

2. Program perencanaan mengarah pada pembentukan sifat dan perilaku wirausaha. Pembentukan kedua variabel ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan program tersebut, maka dapat diciptakan program pemberdayaan yang kuat yang sebaiknya dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan sifat wirausaha terutama yang terkait dengan penumbuhan sikap percaya diri yang tinggi dalam menjalankan usaha.
 - b. Pengembangan budaya kewirausahaan yang dapat mendorong motivasi usaha melalui berbagai kegiatan dan gerakan yang membangkitkan semangat berwirausaha di kalangan usaha kecil.
 - c. Pengembangan motivasi usaha dengan menanamkan sikap optimis bagi pengusaha kecil melalui visi pertumbuhan yang jelas dan yang ingin dicapai.

3. Untuk merealisasikan kompetensi wirausaha, memerlukan tahapan dan rangkaian yang saling berkaitan dengan aspek lainnya.. Lemahnya program pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kompetensi wirausaha yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang perlu dilakukan diantaranya :
 - a. Memacu kemampuan dan motivasi yang tinggi terhadap pengusaha kecil melalui program pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan aspek teknis, manajerial dan kewirausahaan serta

pelatihan motivasi seperti; *achivement motivation training*, *sensistivity training* dan pelatihan motivasi lainnya.

- b. Meningkatkan kompetensi pengusaha kecil terutama yang terkait dengan kompetensi kepemimpinan melalui pelatihan kepemimpinan, dan pengendalian karyawan. Selain itu perlunya perhatian yang serius terhadap kompetensi koqnitif, pengetahuan dan sumber daya manusia yang relatif rendah. Proses penambahan pengetahuan seharusnya dilakukan secara terencana dan terprogram yang dapat diikuti oleh pengusaha kecil dalam kurun waktu yang singkat dan efektif.
 - c. Menciptakan kompetensi inti melalui berbagai pendekatan dengan melakukan orientasi pekerja, orientasi pekerjaan dan orientasi beragam metode. Dengan sumber daya yang dimiliki dan kapabilitas yang menjadi keunggulan kompetitif melebihi para pesaingnya dengan kemampuan untuk menentukan strategi, membaca peluang, mengorganisir bawahan dan karyawannya termasuk kegiatan sosial dan lingkungannya. Oleh karena itu menciptakan kompetensi pengusaha kecil dengan memperhatikan motif, sifat dasar (bawaan atau bakat), konsep diri, kekuatan pengetahuan dan kemampuan koqnitif.
4. Pemerintah Propinsi Riau sebaiknya memfasilitasi dan mendorong pengusaha kecil untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam memproduksi agar dapat menciptakan produk berkualitas untuk memuaskan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

- a. Melaksanakan berbagai lomba yang terkait dengan upaya penciptaan kreativitas dan inovasi produksi baik dalam bentuk, rasa, komposisi, *packing*, nilai higienis.
 - b. Melaksanakan berbagai iven atau kegiatan yang dapat mendorong pengusaha kecil untuk menciptakan produk baru dan dapat bersaing dengan produk lainnya, termasuk mengikutsertakan pengusaha kecil dalam berbagai pameran, bazaar dan sebagainya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - c. Memfasilitasi dan melindungi produk-produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pendaftaran merk, pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama perlindungan terhadap komposisi dan resep produk yang telah diciptakan.
5. Pemerintah Propinsi Riau sebaiknya menggalakkan gerakan mewirausahakan masyarakat yang didukung oleh budaya setempat baik di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, organisasi sosial dan masyarakat. Program mewirausahakan masyarakat dapat ditempuh dengan cara :
- a. Memasukkan materi pembelajaran kewirausahaan disetiap tatanan pendidikan baik tingkat sekolah menengah maupun di Perguruan Tinggi, tidak hanya di Fakultas Ekonomi tetapi juga diberbagai fakultas lainnya, agar tujuan mewirausahakan masyarakat menjadi lebih bermakna dan berhasil.
 - b. Mengembangkan secara terus menerus materi kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil baik dari aspek

- pengetahuan/keterampilan, manajemen usaha, peluang usaha termasuk aturan yang diperlukan untuk mendukungnya.
- c. Membentuk Tim Ahli Kewirausahaan yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang bertugas untuk memberikan pencerahan dan pengalaman yang diperlukan oleh usaha kecil.
 - d. Disamping itu diperlukan kurikulum pendidikan kewirausahaan diterapkan pada lembaga pendidikan nonformal dan luar sekolah.
6. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menerapkan pola kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan mendorong usaha kecil untuk mewujudkan usahanya menjadi lebih berkembang melalui berbagai cara diantaranya :
- a. Menanamkan sikap kerja keras dan etos kerja yang tinggi untuk meraih keberhasilan, pantang menyerah melalui pembinaan sikap mental dan berorientasi pada tujuan laba dan kontinuitas.
 - b. Memberi kemudahan dalam hal sumber-sumber pembiayaan, perizinan, akses pasar dan pemanfaatan teknologi.
7. Untuk keberhasilan program pemberdayaan sebaiknya mengembangkan budaya kewirausahaan dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan visi pertumbuhan usaha kecil dan mewujudkan kompetensi wirausaha serta pertumbuhan usaha baik dari segi penjualan maupun laba.

Demikian orasi ilmiah ini saya sampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Riau ke 48 semoga bermanfaat adanya, Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada hadirin yang saya hormati.

**Wabillahitaufiq wal hidayah,
Wasalamu'akaum warahmatullahi wabaraktuh.**

CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Zulkarnain, SE., MM
Tempat lahir : Rengat
Tanggal lahir : 18 Juli 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IV-C
Bidang Keahlian/Spesialisasi : Manajemen Pemasaran

II. Data Keluarga

Nama Istri : Hj. Chaerani Daeng Usman
Nama Anak : 1. Rizky Perdana Putera
2. Ichsan Satya Anugerah
3. Ilmi Fajar Ramadhan
Orang Tua : (Alm) Aminuddin AY- Hj. Aminah
Alamat : Perumahan Duta Mas, Blok A3/1
Telp. (0761) 71644 HP. 08127523322-081378654999
e-mail : zkarnain18 @ Yahoo.co.id.

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1967-1972 : Sekolah Dasar Negeri No. 7 Tembilahan
- 1973-1976 : SMP Muhammadiyah Tembilahan
- 1977-1980 : SMEA Negri Tembilahan
- 1980.1985 : Fakultas Ekonomi Universitas Riau
1997-1998 : Program Studi Magister Manajemen Agribisnis
Program Pasca Sarjana-Institut Pertanian Bogor
- 2003-2008 : Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas
Brawijaya Malang

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

- 1987-sekarang : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNRI
- 1992-1997 : Wakil Ketua Dewan Himpunan Lembaga Latihan Swasta
Indonesia (DPD HILLSI) Daerah Tk. I Riau
- 1993-1994 : Manajer Pemasaran CV. Aquita
- 1995-1999 : Peneliti Pusat Pengkajian Ekonomi dan Dunia Usaha
(PPE-PDU)
- 1995 : Instruktur Pusat Pembinaan Pengembangan Koperasi dan
Pengusaha Kecil (P3KPK) Fakultas Ekonomi UNRI
- 1996-sekarang : Instruktur Lembaga Pelatihan Manajemen Usaha
Kecil
Pada Berbagai BUMN dan Lembaga Latihan Swasta
- 1999-sekarang : Dosen Pada Program Magister Manajemen UNRI
- 2000-2004 : Anggota Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK) Provinsi Riau.
- 2000-2007 : Direktur Lembaga Pelatihan Pengembangan Usaha
Kecil/Koperasi (LPPUK)
- 2000-sekarang : Dewan Pendiri Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat
(YASPER)
- 2001- 2006 : Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Manajemen
(BPPM) Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

- 2001-Sekarang : Koordinator Tim Pengkaji/Pendamping Pemerintah Kota Pekanbaru
- 2007-2009 : Koordinator Tim Ahli Program Ekonomi Kerakyatan Propinsi Riau.
- 1999-Sekarang : 1. Dosen Pasca Sarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- 2008-Sekarang 2. Dosen Pasca Sarjana Prodi Magister Sains Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
3. Dosen Pasca Sarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

V. KURSUS/PELATIHAN/*WORKSHOP*/LOKAKARYA

1987

1. *Workshop Instructional Improvement* di Pekanbaru
2. Peserta penataran dan Lokakarya Sistem Kredit Semester di Pekanbaru

1989

1. Magang Marketing Managemen FE Universitas Indonesia IUC-UI di Jakarta
2. Kursus singkat Ekonomi Regional IUC-UI di Jakarta
3. Seminar Lokakarya *Urban and Regional Economics* IUC-UI di Jakarta

1990

1. Kursus singkat Perilaku Konsumen IUC-UI di Jakarta
2. Kursus singkat Menejemen Keuangan IUC-UI Jakarta

1992

1. Panitia Pelaksana Penlok Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat Tenaga Akademis FE UNRI

1993

1. Peserta Lokakarya Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Jurusan Manajemen FE UNRI
2. Peserta Penataran Manajemen Sumber Daya Manusia HEDS PROJECT di Pekanbaru
3. Peserta Workshop Perdagangan Internasional HEDS PROJECT di Pekanbaru

1994

1. Peserta Penataran Manajemen Operasional II HEDS PROJECT di Pekanbaru

2. Peserta Lokakarya Pembahasan Studi Kasus Pemasaran di UNSYIAH Banda Aceh
3. Peserta *Workshop On Case Writing Method of Marketing Management* HEDS PROJECT di Pekanbaru

1996

1. Panitia Pelaksana Pelatihan Penggunaan Instrumentasi Untuk Meningkatkan Mutu Dan Produktivitas Industri HEDS PROJECT di Pekanbaru
2. Peserta *Workshop Statistics Package for Social Science (SPSS+PC+)* FE-UNRI di Pekanbaru

2008

1. Peserta "*Achievement Motivation Training "Sang Pembelajar"*- Andri Wongso, Hotel Pangeran, 25 Agustus 2008.
2. Peserta Studi Banding "*Pengembangan Sektor Pertanian dan Agribisnis - Pemerintah Kota Pekanbaru di Thailand.*

VI. KEGIATAN PENELITIAN

1985

1. Prospek Pengembangan Industri Sagu di Kabupaten Indragiri Hilir (skripsi)

1988

1. Ketua Peneliti Pengaruh Perbedaan Sistem Produksi Terhadap Tingkat Pengembalian Investasi Industri Sagu di Kabupaten Indragiri Hilir

1992

1. Anggota Peneliti Pemasaran Gula Enau Di Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar

1993

1. Anggota Peneliti Peranan Lembaga Pendidikan Komputer Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1994

1. Ketua Peneliti Mekanisme Pemasaran Hasil Produksi Kopro Di Kabupaten Indragiri Hilir
2. Anggota Peneliti Peranan Lembaga Swasta Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Kotamadya Pekanbaru

1995

1. Anggota Peneliti Pola Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) di Provinsi Riau
2. Ketua Peneliti Prospek Pengembangan Industri Kecil Makanan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tembilahan

1996

1. Anggota Peneliti Analisis Komparatif Pemberian Upah Buruh Sebelum Dan Sesudah UMR Di Salah Satu Perusahaan *Plywood* di Pekanbaru
2. Anggota Peneliti Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten DATI II Kampar
3. **Peneliti Utama** Survey Angkatan Kerja Daerah (SAKERDA) Kotamadya Pekanbaru 1996
4. Anggota Peneliti Dampak Penataran P 4 Terhadap Perilaku Siswa SLTA di Provinsi Riau

1997

1. **Ketua Peneliti** Analisis Perilaku Konsumen Berbelanja Pada Supermarket di Kotamadya Pekanbaru.

1998

1. Strategi Pengembangan Pola Kemitraan Pengusaha Kecil/Koperasi dan Pengusaha Menengah/Besar/BUMN di Propinsi Riau (Tesis)

2000

1. **Ketua Peneliti** “Kajian Tentang Industri Kecil” di Kota Batam
2. Peneliti Profil Investasi Di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Peneliti “Kawasan Tertinggal “ di Propinsi Riau

2001

1. **Ketua Peneliti**, Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Provinsi Riau.
2. Peneliti Profil Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau

2002

1. **Ketua Peneliti** “Revitalisasi KUKM di Provinsi Riau”, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau.
2. **Ketua Peneliti** “Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kota Pekanbaru”, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

2004

1. **Ketua Peneliti** Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru
2. **Ketua Peneliti** Identifikasi Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir.
3. **Ketua Peneliti** “Pelaksanaan Penempatan Pegawai Dalam Sistim Organisasi dan Tata Laksana (SOT) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru.

2006

1. **Ketua Peneliti** Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Kabupaten Indragiri Hilir

2007

1. **Ketua Peneliti** Kajian Beberapa Sektor Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Pelayanan Pelabuhan Kapal) dan Pajak Hotel dan Restoran)di Kabupaten Bengkalis.
- 2008

1. Program Pemberdayaan Pengaruhnya Terhadap Kompetensi Wirausaha dan Pertumbuhan Usaha Kecil di Provinsi Riau (Disertasi).
- 2009

1. **Ketua Peneliti**, Studi Penyempurnaan Program Ekonomi Kerakyatan, Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Riau dengan Badan Kajian Manajemen dan Pengembangan Bisnis FE UR.
2. **Peneliti Utama**, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penyusunan Data Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Badan Kajian Manajemen dan Pengembangan Bisnis FE UR.
3. **Peneliti Utama**, Identifikasi, Evaluasi Pemetaan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan dan Strategi Pengembangan serta Pemberdayaan Pemanfaat Program, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dengan Badan Kajian Manajemen dan Pengembangan Bisnis FE UR.

VII. SEMINAR

1987

1. Peserta seminar Mencari Terobosan Baru Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Riau Dalam Pembangunan Menuju Tahun 2001 di Pekanbaru

1988

1. Peserta seminar Mencari Terobosan Baru Untuk Meningkatkan Peran Dunia Industri Dalam Pembangunan Repelita V di Pekanbaru
2. Peserta seminar Mencari Bentuk Kepeloporan Pemuda Dalam Gerak Langkah Pembangunan Koperasi di Daerah Riau pada Pelita V di Pekanbaru

1994

1. Peserta Seminar Pasar Modal, Peranannya Dalam Pemenuhan Dana Investasi Pada PJP II Bapepam-FE UNRI di Pekanbaru.

1995

1. Ketua Panitia Pelaksana Seminar Riau Menghadapi IMS-GT, AFTA dan APEC Sebuah Sumbangan Pemikiran-UNRI Pekanbaru
2. Peserta Seminar Nasional Mencari Pemerintahan Yang Menjamin Keberpihakan Pembangunan Kepada Masyarakat - UNRI

1996

1. Sekretaris Simposium Nasional Sagu II di Pekanbaru
2. Bendaharawan *The Sixth Internasional Sago Symposium* di Pekanbaru

2000

1. Pemakalah Seminar Dalam Rangka Hari Koperasi ke-52 Kota Pekanbaru.

2001

1. Pemakalah Seminar Sehari "Pemberdayaan KP-RI" di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Ceramah Ilmiah "*Good Governance*" di PT. Asuransi Jasa Raharja Cabang Pekanbaru.

2007

1. Pembicara Seminar "Refleksi Ekonomi Pekanbaru Tahun 2006 dan Proyeksi Tahun 2007, Penyelenggara KADIN Kota Pekanbaru, Hotel *Quality* Pekanbaru.
2. Peserta Seminar Sehari "*Service Recovery Strategy*" - Mengubah Kekecewaan Pelanggan/Publik Menjadi Kekuatan Pengendali", *BePe Management* dan Inkubator Bisnis, Pekanbaru.
3. Peserta "*Agrifood, Veterinary, Authority (AVA)* Singapore - 2 nd *Vegetables and Fruits Indonesia*, Pasir Panjang 26 Oktober 2007, Singapore.

2008

1. Pembicara Seminar Nasional : "*Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Kerakyatan*", Disampaikan pada acara Seminar Dinamika Demokratisasi Pada Pasca Orde Baru di Indonesia, tanggal 20 Januari 2008.

2009

1. Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional "Optimalisasi Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Sistem Keuangan Daerah Berbasis Kinerja", Tanggal 18 Juli 2009, Pekanbaru.
2. Pemakalah Seminar "Produktivitas Provinsi Riau-Dari Sudut Pandang Akademisi", Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Pekanbaru.
3. Pemakalah Seminar "Identifikasi, Evaluasi, Pemetaan Program-Program Kredit Ekonomi Kerakyatan dan Strategi Pengembangan Serta Pemberdayaan Pemanfaatan Program Tahun 2009, Balitbang Provinsi Riau.

2010

1. Pemakalah "Seminar Nasional Kewirausahaan I", Universitas Brawijaya Malang, Tanggal 20 Januari 2010.
2. Pemakalah Seminar "Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ISEI Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau, Tanggal 20 Februari 2010.

VIII. KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1995

1. Ketua Pelaksana Bimbingan & Penyuluhan Manajemen Usaha Kecil (MUK) Industri Kecil Makanan dan Minuman di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan
2. Tenaga Penatar Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Bagi Pengusaha Kecil di Propinsi Riau

1996

1. Tenaga Penatar Pelatihan MUK Bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi Mitra Binaan PT (Persero) Angkasa Pura II
2. Tenaga Penatar Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Bagi Pengusaha Kecil di Provinsi Riau
3. Tenaga Penatar Pelatihan MUK Bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi Mitra Binaan PT (Persero) ASTEK di Propinsi Riau
4. Tenaga Penatar Penataran Peningkatan Kemampuan Dan Peran Dekopin Di Daerah Riau
5. Tenaga Penatar Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Bagi PK Binaan PT. Tambang Timah Bangka
6. Tenaga Penatar Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Bagi PK Binaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia
7. Tenaga Penatar Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi Mitra Binaan PT (Persero) Angkasa Pura II.

2005

1. Tenaga Penceramah “Kewirausahaan” pada acara Pelatihan Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru, Aula Kantor Walikota Pekanbaru.

2007

1. Tenaga Penatar Manajemen Pemasaran pada Pelatihan Kewirausahaan (Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas), Pusat Pengembangan Wiraswasta Indonesia Riau, Hotel Indrayani, Pekanbaru.
2. Tenaga Penatar Perda No. 11 Tahun 2001, pada acara Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah, Kepmenegkop No. 98 Tahun 2004 dan Perda No. 11 Tahun 2001, Hotel Indrapura, Pekanbaru.
3. Tenaga Penceramah “Peran BPR Dalam Pengembangan Ekonomi”, pada kegiatan “*In House Training* Pembekalan Pegawai Bank PD. BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan, Hotel Indrayani, Pekanbaru.
4. Tenaga Penceramah “Kewirausahaan” pada acara Pelatihan Kewirausahaan Perempuan Produksi Amplang Tenggara dan Lempuk Durian, Aula Balai Latihan Tenaga Kerja (BLTK), Pekanbaru

2008

1. Tenaga Penceramah Pembinaan Usaha Kecil, disampaikan pada acara Pembekalan Mahasiswa KKN UNRI, tanggal 9 Februari 2008, Pekanbaru.

2009

1. Narasumber “*Workshop* Pembahasan Kasus dan Jurnal Ilmiah, Universitas Islam Indragiri

IX. PENULISAN BUKU/JURNAL/KARYA ILMIAH/PENGHARGAAN

Penulisan Buku :

1. Tahun 2001 bersama kawan-kawan menerbitkan buku **"Petani Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan"** , Penerbit UNRI Press, Pekanbaru.
2. Tahun 2001 menerbitkan buku pertama yakni **"Membangun Ekonomi Rakyat"**, *Persepsi Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi Di Riau*. Penerbit UNRI Press Pekanbaru.
3. Tahun 2002 juga menerbitkan buku **"Membangun Ekonomi Rakyat"** *Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Penerbit Adicita, Yogyakarta.
4. Tahun 2006 menerbitkan buku **"Kewirausahaan-Strategi Pemberdayaan UKM dan Penduduk Miskin"**. Penerbit Adicita Yogyakarta.
5. Tahun 2008 bersama kawan-kawan menerbitkan buku **"Demokrasi, Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial"**, Penerbit *Red Post Press* Pekanbaru.
6. Tahun 2010 menerbitkan buku **"Pemberdayaan Masyarakat Miskin"**, Penerbit Apel Media, Yogyakarta.

Penulisan Jurnal Penelitian :

1. Tahun 2001, *"Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil-Menengah di Propinsi Riau"*, No. ISSN 0825, Volume X No. 2 Juli-Desember 2001, Lembaga Penelitian Universitas Riau.
2. Tahun 2004, *"Identifikasi Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir"*, ISSN 14010-3575, SK Akreditasi : 23^a/DIKTI/Kep/2004, Volume XI No. 19/Februari 2007, Pusat Penelitian Industri dan Perkotaan Universitas Riau.
3. Tahun 2008, *"Program Pemberdayaan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil di Propinsi Riau"*, ISSN : 1693-5241, Volume 6 NO. 3, Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Terakreditasi SK. Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2008, Universitas Brawijaya Malang.
4. Kompetensi Wirausaha : Pengaruhnya Bagi Pertumbuhan Usaha Kecil dan Hubungannya dengan Tingkat Pendidikan Formal. ISSN : 1693-5241, Volume 7 No. 3 Agustus 2009, Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Terakreditasi SK. Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2008, Universitas Brawijaya Malang.

Penulisan di Majalah Ilmiah dan Penghargaan:

1. *"Menyelamatkan Industri Kecil Dalam Kemitraan"*, Media Indag, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau, Tahun 2006, Pekanbaru.
2. *"Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin"*, Majalah *"Economica"* Media-Komunikasi ISEI Riau, Edisi Maret-April 2008, Pekanbaru.
3. *"Mewujudkan Program Pemberdayaan Masyarakat Yang Hakiki"*, Majalah *"Economica"* Media-Komunikasi ISEI Riau, Edisi Mei - Juni 2008, Pekanbaru.
4. *"Kompetensi Wirausaha" Perspektif Pertumbuhan dan Pendidikan di Propinsi Riau*, Majalah *"Economica"* Media-Komunikasi ISEI Riau, Edisi Juni-Juli 2009, Pekanbaru

5. "Urgensi Pengembangan PEK Dalam Konteks Perekonomian Riau Kedepan", Majalah "*Economica*" Media-Komunikasi ISEI Riau, Edisi 14 Tahun 2010.
6. Dekopin Kota Pekanbaru, Pemenang Terbaik III, Lomba Karya Tulis Hari Koperasi ke 52, Tahun 2003, Pekanbaru.
7. *RM Books* (Rakyat Merdeka Group), "Sebagai Kontributor Ahli Dalam Penyusunan Buku Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru-Menuju Kota Terkemuka Indonesia", Jakarta Juli 2009.

DAFTAR PUSTAKA

ADB, 2002, *Praktek Terbaik Dalam Menciptakan Suatu Lingkungan Yang Kondusif Bagi UKM*, ADB SME Development TA Indonesia.

Aggestam, M. 2002. *Competence, Governance, and Entrepreneurship. Advances in Economic Strategy Research*; Nicolai Foss and Volker Mahnke (Eds.); Oxford University Press, Oxford, 2002, 339pp, *Scandinavian Journal of Management*, 18(4) : 611-614

Alma, Buchari, 2002, *Kewirausahaan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Alvarez, S.A. and Busenitz, L.W. 2001. *The Entrepreneurship of resource-based theory*, *Journal of Management*, 27 (6) : 755-775

Ardichvili, A., Cardozo, R., and Ray, S. 2003. *A theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development*, *Journal of Business Venturing*, 18(1) :105-123

- Argene, Robert, 2005, *Strategi Menjadi Wiraswasta Handal*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- Arent Greve. 2001. *Networks and entrepreneurship an Analysis of Social Relations, Occupational Background, and Use of Contacts During The Establishment Process, Scandinavian Journal of Management*, 11 (11) : 1-24
- Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, Riau Dalam Angka 2009.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2001, *Profil Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Riau*, Pekanbaru.
- Babb, E.M. and Babb,S.V. 1992. *Psychological Traits of Rural Entrepreneurs, Journal of Socio-Economics*, 21 (4): 353-362
- Baron, R.A. and Markman,G.D. 2003., *Beyond Social Capital: The Role Of Entrepreneurs' Social Competence in Their Financial Success, Journal of Business Venturing*, 18 (1) : 41-60
- Baum, J. Robert, Edwin A. Locke and Ken G. Smith., 2001, *A Multidimensional Model of Venture Growth. Academy of Management Journal* 44 (2) : 292-302.
- Bechard, J.P. and Toulouse,J-M. 1998. *Validation of a Didactic Model for The Analysis of Training Objectives in Entrepreneurship, Journal of Business Venturing*, 13 (4) : 317-332
- Berry, A., Rodriguez., E., and Sandee, H. *Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia. Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 37 (3) : 263-384.
- Boussouara, M. And Deakins,D. 2000. *Trust and the Acquisition of Knowledge from Non-executive Directors by High Technology Entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 6 (4): 204-226.
- Brandstatter,H. 1997. *Becoming an entrepreneur - a question of personality structure?*, *Journal of Economic Psychology*, 18, (2-3) : 157-177
- Bruyat,B. And Julien,P.A. 2001. *Defining The Field of Research In Entrepreneurship, Journal of Business Venturing*, 16 (2) : 165-180
- Carayannis, E.G., Evans,D. And Hanson,M. 2002. *A cross-cultural Learning Strategy for Entrepreneurship Education: Outline of Key Concepts and Lessons Learned From a Comparative Study of Entrepreneurship Students in France and the US, Technovation*, in Press, Corrected Proof, Available online 24 October 2002,

- Casson, M. 1997. *Entrepreneurship and Business Culture, Long Range Planning*, 30 (1) : 144
- Chaston, I., Badger, B and Sadler-Smith, E. 1999. *Organizational Learning: Research Issues and Application in SME Sector Firms. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 5 (4) : 191-203.
- Choueke, R. And Armstrong, R. 1998. *The Learning Organisation in Small and Medium-sized Enterprises. A destination or a journey? International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 4 (2) : 129-140.
- Collins, C., Locke, E. And Hanges, P., 2000, *The Relationship of Need for Achievement to Entrepreneurial Behavior : a Meta-analysis*, Working Paper, University of Maryland, College, M.D.
- Davidson, P. And Honig, B. 2002. *The role of social and human capital among nascent entrepreneurs*, Journal of Business venturing, (online) 21 September 2002
- Deakins, D. 1996. *Entrepreneurship and Small Firms*. The Mcgraw-Hill Company. London.
- DeSimon, R.L., and harris, D. M. 1998. *Human Resource Development*. Harcourt. Inc. Orlando, FL.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, 2006, *Kebijakan dan Pemetaan Industri dan Perdagangan, Menuju Visi Riau 2020*, Pekanbaru-Riau.
- Dodd, S.A. 2001. *Metaphors and Meaning: A grounded cultural model of us entrepreneurship*, Journal of Business Venturing, 17 (5) : 519-535
- Donald L., Sexton Nancy B., Upton Larry E., Wacholtz Patricia P. McDougall. 1997. *Learning Needs of Growth-Oriented Entrepreneurs*, Journal of Business Venturing, 12 (1) : 1-8
- Drucker, P.F. 1985, *Innovation and Entrepreneurship : Practice and Principles*, New York : Harper and Row.
- Erikson, T. 2002. *Entrepreneurial Capital: The Emerging Venture's Most Important Asset and Competitive Advantage*, Journal of Business Venturing, 17 (3) : 275-290.
- Ede, Fred O., Bhagaban Panigrahi, Jon Stuart dan Stephen Calcich, 2000, *Ethics In Small Minority Business*, Journal of Business Ethic 26 : 113-146.
- Ferdinand, A., 2000, *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen, Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis S-2 dan Disertasi S-3*, Semarang : BP Universitas Diponegoro.

- Freire, Paulo, 1992, *Pedagogy of the Pressed*, New York, The Continuum Publishing Company.
- Friedmann, Jhon, 1992, *Empowerment, : The Ploitics of Alternative Development*, Cambridge Mass, Blackwell Publisher.
- Fiet, J.O. 2001. The Pedagogical Side of Entrepreneurship Theory, *Journal of Business Venturing*, 16 (2) : 101-117
- Freel, M.S. 1999. *Where are the skills gaps in innovative small firms?* International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 5 (3) : 144-154.
- Gartner Scott, W.B. and Shane, A. 1995. *Measuring entrepreneurship over time*, Journal of Business Venturing, 10 (4) : 283-301
- GartnerTerence, W.B., Mitchell, R. And Vesper, K.H. 1989. *A taxonomy of new business ventures*, Journal of Business Venturing, 4 (3) : 169-186
- Grant, Robert M., 1997, *Analisis Strategi Komtemporer (konsep, Teknik, Aplikasi, Edisi Kedua*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hamid, Edi Suandi, 2010, *Implementasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Seminar ISEI Cabang Pekanbaru Koordinator Propinsi Riau, 20 Februari 2010.
- Hair Jr, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C., 1998, *Multivariate Data Analysis*, Fith Edition, New Jersey : Prentice Hall International, Inc.
- Hitt, Michael A., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, 2001, *Strategic Management, Competitiveness and Globalization Concepts*, South-Western College Publishing.
- Hisrich, R.D., and M.P. Peters, 1998, *Entrepreneurship*, Fourt Edition, California : McGraw-Hill.
- Hisrich, Robert D., Peters, Michael P., Sheperd, Dean A., 2008, *Entrepreneurship*, International Edition, Seventh Edition, Mc. Graw Hill.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen, 2003, *Manajemen Strategis*, Edisi Kelima, Terjemahan Julianto Agung, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- HMA., Kusnadi, 2001, *Pengantar Manajemen Strategi*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang.
- Isyandi, 1996, Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perubahan Struktur Perekonomian Jawa Barat Daalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (1969-1993), Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.

- Kao, John, 1991, *The Entrepreneur*, Prentice Hall, Singapura.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, "*Strategi Pengembangan Usaha Kecil. Kesempatan dan Tantangan Dalam Proses Transformasi Global dan Nasional*", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dalam rangka HUT ke-20, Jakarta, 26 September 1996.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 116/KMK.016/1994 tentang *Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Bdan Usaha Milik Negara*, Jakarta.
- Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Statistik Usaha Kecil Memengah Tahun 2007-2008*, Jakarta.
- Lambing, P. And Kuelh, *Entrepreneurship*, Second Edition, Prentice Hall, Upper Sadle River, NJ 07458.
- Lee, D.Y., and Tsang, E.W.K., 2001, *The Effects of Entrepreneurial Personality Background and Network Activities on Venture Growth*, Journal of Management Studies, Vol. 38(4). Pp. 583-109.
- Man, T.W.Y., Lau, T. And Chan, K.F., 2002, *The Competitiveness of Small and Medium Enterprises : A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies*, Journal Business Management, January. Pp. 37-52.
- Meredith, N., 1988, *The Practice of Entrepreneurship*, International Labor Organization, Genewa.
- Marbun, BN, 1993, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Osborne, D. and Gaebler, T., 1993, *Reinventing Government, How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Sector*, Public Administration Review, Vol. 53 Jan/Feb pp.83-85.
- Ray, M., 2000, *Leadership and Learning Organization*, The Learning Organization, Vol. 7 (5) p.241.
- Robbins, S.P. 1993, *Organizational Behavior*, Sixth Edition, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Rose, Raduan Ches, Naresh Kumar & Lim Li Yen, 2006, The Dynamics of Entrepreneurs' Succes Factors In Influencing Venture Growth, *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, Volume II, Issue 2*.
- Shefferd, Dean A., Richard Attenson and Andrew Crouch, 2000, New Venture Strategy and Profitability : A Venture Capitalist's Assesment, Journal of Business Venturing 15.499-467.
- Siagian, Salim, 2001, *Sistim Ekonomi Kerakyatan*, Majalah Usahawan, Jakarta.
- No. 02 Th XXX Pebruari 2001

Shane, S., Locke, E.A., and Collins, C.T., 2003, *Entrepreneurial Motivation*, Human Resources Management Review, Vol. 13, pp. 25-279.

Tan, Melly G., *Beberapa Catatan Tentang Aspek Sosisl Politik dan Budaya*

Usman, Husaini dan Akbar P. Setiadi, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

Yusuf, A., 1995, *Critical Success Factors fo Small Business; Perceptions of South Pacific Entrepreneurs*, *Journal of Small Business Management*, 33 (2), 68-73.

Wrihatnolo, Randy R. dan Diant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan- Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit PT. Elex Media Komptindo, Jakarta.

Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat, Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Penerbit Adicita, Yogyakarta.

Zulkarnain, 2006, *Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*, Adicita Yogyakarta.

Zulkarnain, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Penerbit Apel Media Yogyakarta.

Zimmerer, TW and N.M. Scarborough, 2005, *Essential of Entrepreneurship and Small Business Management 4 th*, Pearson Prentice Hall, Singapore.

Zulkarnain, 2001, *Membangun Ekonomi Rakyat, Persepsi Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi Di Riau*, Penerbit UNRI Press, Pekanbaru.

Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat, Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Penerbit Adicita, Jogjakarta.

Zulkarnain, 2006, *Kewirausahaan- Strategi Pemberdayaan UKM dan Pemeberdayaan Masyarakat Miskin*, , Penerbit Adicita, Jogjakarta.

Zulkarnain, 2008, *Program Pemberdayaan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil Di Propinsi Riau*, Disertasi-Universitas Brawijaya Malang.

Zulkarnain, 2010, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Penerbit Apel Media, Yogyakarta.



RIWAYAT PENULIS

Prof. Dr. H. Zulkarnain, SE., MM., lahir di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, 18 Juli 1960. Latar belakang pendidikan penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri No. 07 (1972), Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah (1976), Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri (1980) diselesaikan di Tembilahan, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Jurusan Manajemen (1985), dan mengikuti Program Magister Manajemen Agribisnis (MMA) pada Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (1998). Doktor Ilmu Manajemen Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang (2008).

Selain aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, penulis juga melakukan berbagai penelitian dan kajian terutama pada bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Sebagai tenaga pelatih di instansi pemerintah dan lembaga latihan swasta dan sering menjadi pembicara pada berbagai diskusi, dialog, lokakarya dan seminar. Berbagai kursus dan workshop yang pernah diikuti penulis di antaranya adalah *Workshop Instructional Improvement* (1987), program magang *Inter University Centre* (IUC) Universitas Indonesia (1989-1990), mengikuti kursus *Marketing Management, Ekonomi Regional, Urban and Regional Economics*, (1989), Perilaku Kosumen dan Manajemen Keuangan (1990). Pada tahun 1994, penulis mengikuti lokakarya Studi Kasus Pemasaran di Unsyiah, Banda Aceh, dan *Workshop On Case Writing Method of Marketing Management* yang diselenggarakan HEDS Project. Berbagai aktivitas seminar sering diikuti di tingkat Provinsi Riau dan memberikan berbagai ceramah tentang Ekonomi Kerakyatan. Selain itu juga masih aktif mengajar di Program Magister Manajemen, Magister Sains Manajemen dan Magister Akuntansi Universitas Riau dan berbagai universitas swasta lainnya. Penulis juga diangkat sebagai Ketua Panitia Pelaksana “Riau Menghadapi IMS-GT, AFTA” dan APEC (1995), Sekretaris “Simposium Nasional Sagu II” (1996), dan sebagai Bendahara “*The Sixth International Sago Symposium*” (1996). Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional Optimalisasi Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung sistim keuangan daerah berbasis kinerja (2009), dan pembicara Seminar Nasional Kewirausahaan I, Universitas Brawijaya Malang (2010).

Saat ini penulis masih menjadi Koordinator Tim Pengkaji/Pendamping Pemerintah Kota Pekanbaru (2001-sekarang), Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Manajemen (BPPM) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Ketua Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Pekanbaru (2002-2006), Direktur Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Koperasi (LPPUK) yang bernaung dibawah Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat. Buku-buku yang pernah diterbitkan “Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan”, dkk, Penerbit Unri Press (2001), “Membangun Ekonomi Rakyat” – Persepsi Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Koperasi di Riau, Penerbit Unri Press (2001), “Membangun Ekonomi Rakyat” – Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Penerbit Adicita Yogyakarta (2003). Kewirausahaan – Strategi Pemberdayaan UKM dan Penduduk Miskin, Penerbit Adicita Yogyakarta (2006) dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin-Penerbit Apel Media Yogyakarta (2009)

